



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 188 TAHUN 2023  
TENTANG  
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2023-2024**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia 2023-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1374);
  8. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2023-2024.**

- KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia 2023-2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Arsitektur SPBE Kejaksaan RI 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE Kejaksaan RI 2023-2024 berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi domain proses bisnis, domain layanan, domain data dan informasi, domain infrastruktur, domain aplikasi, dan domain keamanan.
- KETIGA : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia 2023-2024 selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI 2023-2024 merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kejaksaan RI yang terintegrasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 188 TAHUN 2023  
TENTANG  
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023-2024

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 - 2024

**BAB I**  
**ARSITEKTUR PROSES BISNIS**

**A. Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis**

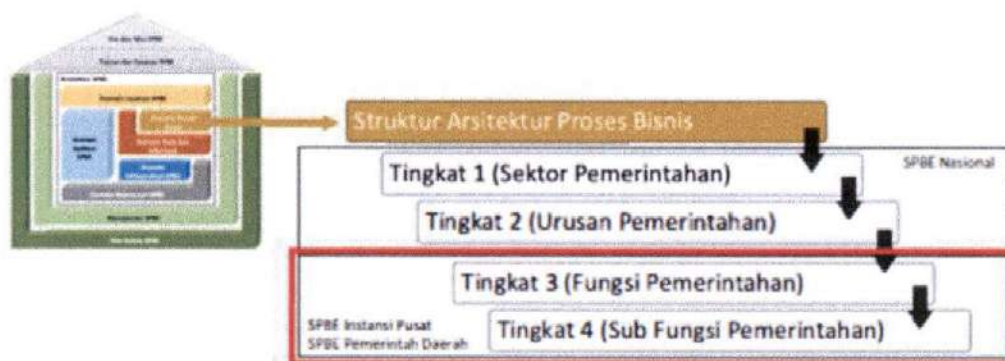
**1. Prinsip Proses Bisnis**

Prinsip Proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Bersifat adaptif, dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi
2. Bersifat konsisten dan komprehensif

Arsitektur proses bisnis Kejaksaan menggambarkan proses bisnis dan tugas utama Kejaksaan dengan acuan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Arsitektur Proses Bisnis juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1. Struktur Arsitektur Proses Bisnis**



Gambar 1 menunjukkan bahwa arsitektur proses bisnis berfokus pada tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) dan tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Fungsi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur proses bisnis tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian arsitektur proses bisnis tingkat 3 dijabarkan lebih rinci ke dalam arsitektur proses bisnis tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan).

## 2. Referensi Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis yang digunakan dalam membuat Arsitektur SPBE Kejaksaan mengacu pada referensi proses bisnis tingkat nasional, khususnya pada kode referensi Kesehatan (04), Ketertiban Umum dan Keselamatan (05), dan Pemerintahan Umum (09) yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

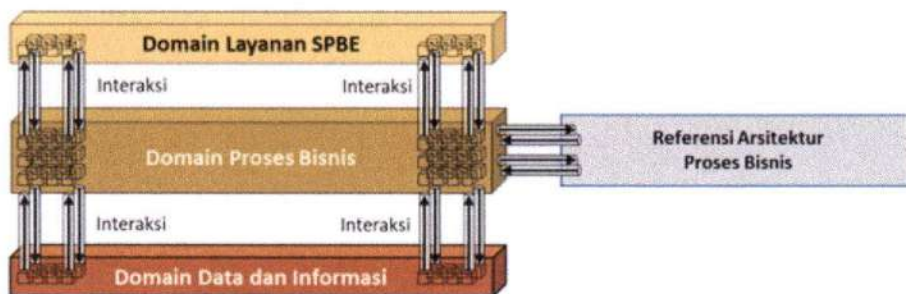
**Tabel 1.1. Referensi Proses Bisnis Arsitektur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri (01)
01.02	Hubungan Negeri Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
		Kesehatan (04)
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan
		Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Dalam bidang hukum
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan
		Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
		Pemerintahan Umum (09)
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

Di bidang Hukum, target arsitektur SPBE adalah terselenggaranya layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi melalui integrasi aplikasi administrasi penanganan perkara di lembaga penegak hukum.

## 3. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 9, dimana domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa- saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



**Gambar 1.2. Keterkaitan antar domain**

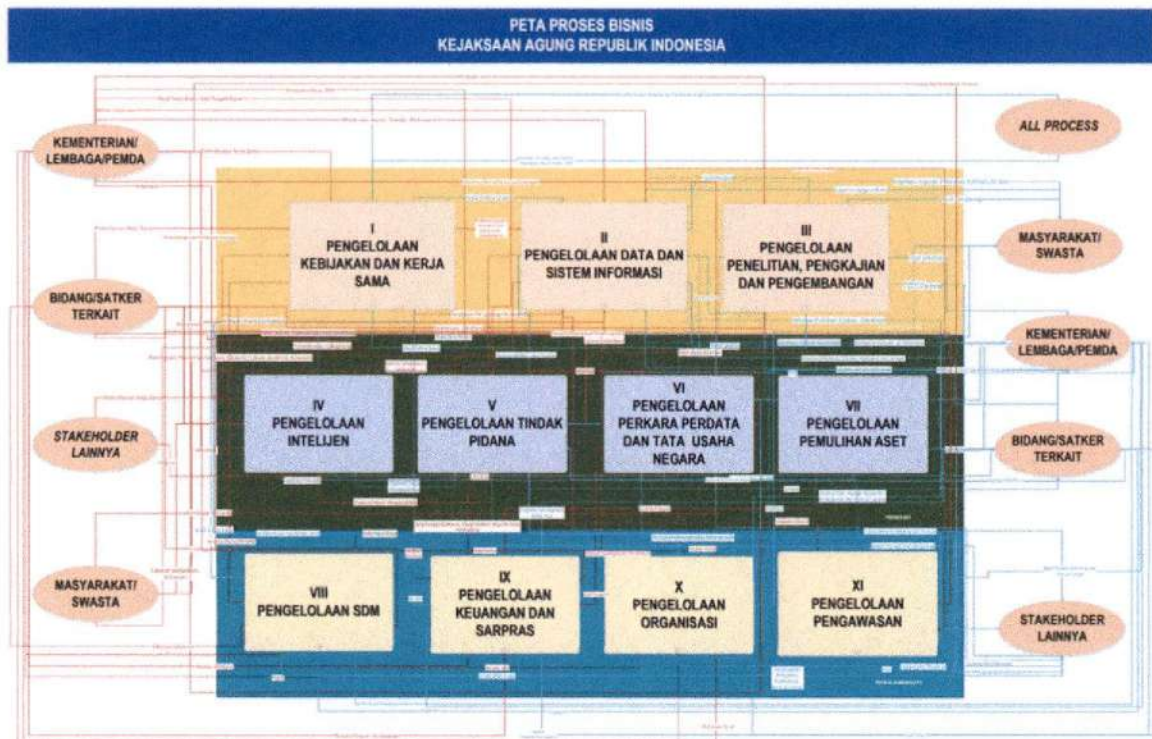
#### 4. Metadata Proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis SPBE Kejaksaan disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata dalam proses bisnis SPBE. Penggunaan metadata ini juga ditujukan untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses bisnis, serta mendukung tata kelola data pemerintah dala Satu Data Indonesia.

#### B. Arsitektur Proses Bisnis Eksisting

##### 1. Identifikasi Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia

Proses bisnis Kejaksaan diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Dokumen Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan. Proses Bisnis Kejaksaan ditunjukkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.8. Diagram Proses Bisnis Level 0 Kejaksaan Republik Indonesia

Diagram 1.8 menunjukkan bahwa di Kejaksaan terdapat 4(empat) proses utama yang dibantu dengan 3(tiga) proses pendukung dan 4 proses sumber daya. Seluruh proses bisnis tersebut memproses *input* dari 4 *stakeholder* dan memproduksi *output* kepada 4 *stakeholder*. Dari diagram proses bisnis level 0 diatas, dilakukan identifikasi dari setiap proses bisnis dan menghasilkan sub proses-sub proses yang dijabarkan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia

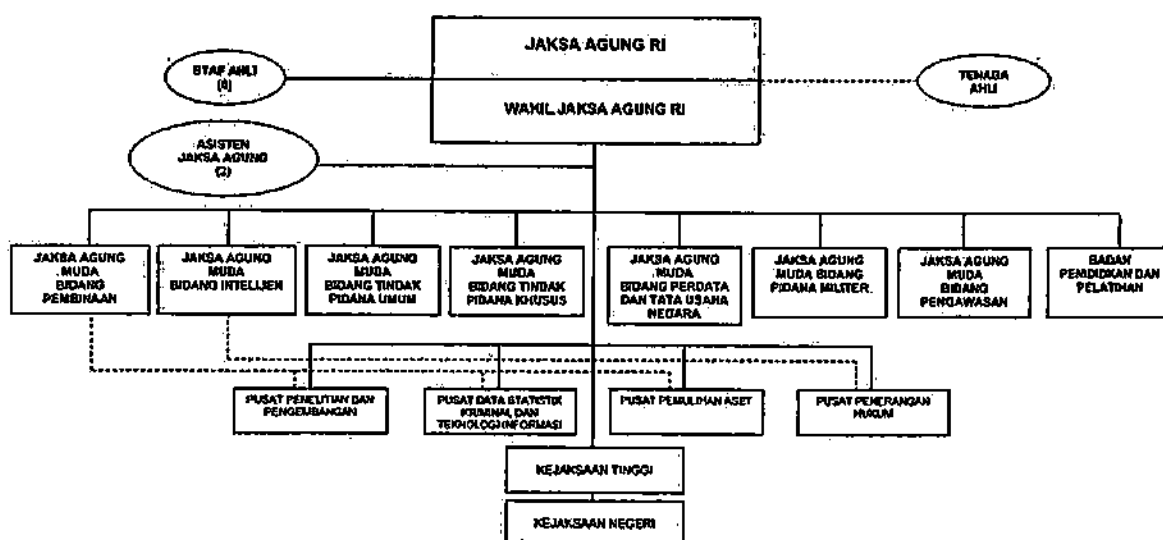
Proses	Sub Proses	ID Proses Bisnis	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional
<b>Proses Bisnis Utama (Inti)</b>			
Pengelolaan Intelijen (KJSB-04)	Pengelolaan Penyelidikan	KJSB-04.01	05.01
	Pengelolaan Pengamanan	KJSB-04.02	05.01
	Pengelolaan Penggalangan	KJSB-04.01	05.01
Pengelolaan Tindak Pidana	Pengelolaan Pra Penuntutan	KJSB-05.01	05.01
	Pengelolaan Penyidikan	KJSB-05.02	05.01

Proses	Sub Proses	ID Proses Bisnis	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional
(KJSB-05)	Pengelolaan Penuntutan	KJSB-05.03	05.01
	Pengelolaan Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	KJSB-05.04	05.01
Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (KJSB-06)	Penegakan Hukum	KJSB-06.01	05.01
	Bantuan Hukum	KJSB-06.02	05.01
	Pelayanan Hukum	KJSB-06.03	05.01
	Pertimbangan Hukum	KJSB-06.04	05.01
	Tindakan Hukum Lain	KJSB-06.05	05.01
Pengelolaan Pemulihan Aset (KJSB-07)	Penelusuran Aset	KJSB-07.01	05.01
	Pengamanan Aset	KJSB-07.02	05.01
	Pemeliharaan Aset	KJSB-07.03	05.01
	Perampasan Aset	KJSB-07.04	05.01
	Pengembalian Aset	KJSB-07.05	05.01
	Pemusnahan/ Penghapusan Aset	KJSB-07.06	05.01
<b>Proses Pendukung</b>			
Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama (KJSB-01)	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	KJSB-01.01	09.07
	Pengelolaan Naskah Dinas Pengaturan lainnya	KJSB-01.02	09.07
	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri	KJSB-01.03	09.07
	Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	KJSB-01.04	01.02
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (KJSB-02)	Pengelolaan Data dan Informasi Kejaksaan	KJSB-02.01	09.03
	Pengelolaan Infrastruktur TIK	KJSB-02.02	09.03
	Pengelolaan Keamanan Informasi	KJSB-02.03	09.03
	Pengelolaan, Analisis Data dan Statistik	KJSB-02.04	09.03
	Perpustakaan	KJSB-02.05	09.03
	Pelayanan Informasi Publik	KJSB-02.06	09.03
	Pengelolaan Media dan Kehumasan	KJSB-02.07	09.03
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	KJSB-02.08	09.03
Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (KJSB-03)	Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	KJSB-03.01	06.03
	Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	KJSB-03.02	06.03
<b>Proses Sumber Daya</b>			
Pengelolaan SDM (KJSB-08)	Perencanaan dan Pengadaan SDM	KJSB-08.01	09.06
	Pengembangan SDM	KJSB-08.02	09.06
	Pengelolaan Diklat	KJSB-08.03	06.01
	Pengelolaan Kinerja Pegawai	KJSB-08.04	09.06
	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	KJSB-08.05	09.06
	Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal	KJSB-08.06	05.01
Pengelolaan Keuangan dan Sarpras (KJSB-09)	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	KJSB-09.01	09.05
	Pelaksanaan Anggaran	KJSB-09.02	09.02
	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	KJSB-09.03	09.02
	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	KJSB-09.04	09.05
	Pengadaan Barang dan Jasa	KJSB-09.05	09.02
	Pengelolaan BMN	KJSB-09.06	09.02
Pengelolaan Organisasi (KJSB-10)	Penataan Lembaga dan Ketatalaksanaan	KJSB-10.01	09.06
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	KJSB-10.02	09.06
	Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	KJSB-10.03	09.07
Pengelolaan Pengawasan (KJSB-11)	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	KJSB-11.01	09.06
	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	KJSB-11.02	09.06

## 2. Identifikasi Stakeholder Utama

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi Kejaksaan, dilakukan identifikasi mitra kerja yang merupakan *stakeholders* beserta keterkaitannya dengan masing-masing proses bisnis di Kejaksaan. *Stakeholders* pada proses bisnis tersebut dibagi atas *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.

*Stakeholders* internal diidentifikasi dari struktur organisasi yang terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ditunjukkan pada gambar 1.3. berikut.



**Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia**

Pada Gambar 1.3 merupakan gambaran struktur organisasi Kejaksaan yang terdiri 7 Jaksa Agung Muda dan 1 Badan, ditopang oleh 4 Pusat, serta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri selaku pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Sedangkan hasil identifikasi *stakeholders* eksternal Kejaksaan yang didapatkan dari dokumen Peta Proses Bisnis ditunjukkan pada Tabel 1.3. berikut.

**Tabel 1.3. Stakeholder Eksternal Kejaksaan Republik Indonesia**

No	Nama Stakeholder	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Nasional Terkait	ID Proses Bisnis
1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	Aparatur Negara (09.06)	KJSB-10.01, KJSB-10.02
2	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Aparatur Negara (09.06)	KJSB-08.01, KJSB-08.02, KJSB-08.04, KJSB-08.05, KJSB-11.01, KJSB-11.02
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)	Informasi (09.03)	KJSB-02.01, KJSB-02.02, KJSB-02.03, KJSB-02.04, KJSB-02.06, KJSB-02.07, KJSB-02.08
4	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Keuangan (09.02)	KJSB-09.02, KJSB-09.03, KJSB-09.05, KJSB-09.06
5	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Kesekretariatan Negara (09.07)	KJSB-01.01, KJSB-01.02, KJSB-10.03
6	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan (06.01)	KJSB-08.03
7	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Perencanaan pembangunan nasional (09.05)	KJSB-09.01, KJSB-09.04
8	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Informasi (09.03)	KJSB-02.03
9	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	Keamanan (05.01)	KJSB-05.01, KJSB-05.02, KJSB-05.03
10	Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)	Hukum (05.01)	KJSB-05.03, KJSB-05.04, KJSB-06.01, KJSB-07.04, KJSB-07.05, KJSB-07.06
11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM)	Hukum (05.01)	KJSB-05.04, KJSB-08.06
12	Kementerian Kesehatan (Kemenkes)	Kesehatan (04.01)	KJSB-08.05, KJSB-12
13	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Hukum (05.01)	KJSB-05.01, KJSB-05.02, KJSB-05.03, KJSB-05.04
14	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)	Hukum (05.01)	KJSB-07.01, KJSB-07.02, KJSB-09.05
15	Badan Pusat Statistik (BPS)	Informasi (09.03)	KJSB-02.04, KJSB-02.06
16	Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP)	Hukum (05.01)	KJSB-04.01, KJSB-05.01, KJSB-05.02
17	BPJS Kesehatan	Kesehatan (04.01)	KJSB-08.05, KJSB-12
18	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (06.03)	KJSB-03.01, KJSB-03.02
19	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Hukum (05.01)	KJSB-04.01, KJSB-05.01

### 3. Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis

Pemetaan struktur organisasi ke dalam proses bisnis diperlukan untuk memastikan keterlibatan unit-unit kerja di Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan Kejaksaan. Pemetaan struktur organisasi dan proses bisnis dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan Tim pelaksanaan SPBE Kejaksaan dan ditunjukkan pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Peta Struktur Organisasi ke dalam proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia**

Unit	ID Unit Kerja	Uraian Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	JAM-BIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;</li> <li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;</li> <li>3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan; dan</li> <li>5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-08.01, KJSB-08.02, KJSB-01.01, KJSB-01.02, KJSB-01.03, KJSB-01.04
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	JAM-INTEL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;</li> <li>2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum;</li> <li>4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan</li> <li>5. melaksanakan pengawasan multimedia</li> </ol>	KJSB-05.01, KJSB-05.02, KJSB-04.03
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	JAM-PIDUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;</li> <li>2. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;</li> <li>4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; dan</li> <li>6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-05.01, KJSB-05.03, KJSB-05.04
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	JAM-PIDSUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;</li> <li>2. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;</li> <li>4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus; dan</li> <li>6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-05.01, KJSB-05.02, KJSB-05.03, KJSB-05.04
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	JAM-DATUN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;</li> <li>2. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;</li> <li>4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;</li> <li>6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-06.01, KJSB-06.02, KJSB-06.03, KJSB-06.04, KJSB-06.05

Unit	ID Unit Kerja	Uraian Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer	JAM-PIDMIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;</li> <li>2. pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;</li> <li>3. penanganan perkara koneksitas;</li> <li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;</li> <li>5. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan</li> <li>7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-05.01, KJSB-05.02, KJSB-05.03, KJSB-05.04
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	JAM-WAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;</li> <li>2. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;</li> <li>5. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>6. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan</li> <li>7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-11.01, KJSB-11.02
Badan Pendidikan dan Pelatihan	BAN-DL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;</li> <li>2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan;</li> <li>5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>	KJSB-08.03
Pusat Penerangan Hukum	P-PEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang penerangan dan penyuluhan hukum, media dan kehumasan, serta hubungan antar lembaga;</li> <li>2. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum;</li> <li>3. pelaksanaan kegiatan hubungan media dan kehumasan;</li> <li>4. koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar Lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan</li> <li>5. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.</li> </ol>	KJSB-2.06, KJSB-02.07, KJSB-02.08
Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	P-DAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;</li> <li>2. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal;</li> <li>3. penerapan dan pengembangan teknologi informasi;</li> </ol>	KJSB-02.01, KJSB-02.02, KJSB-02.03, KJSB-02.04

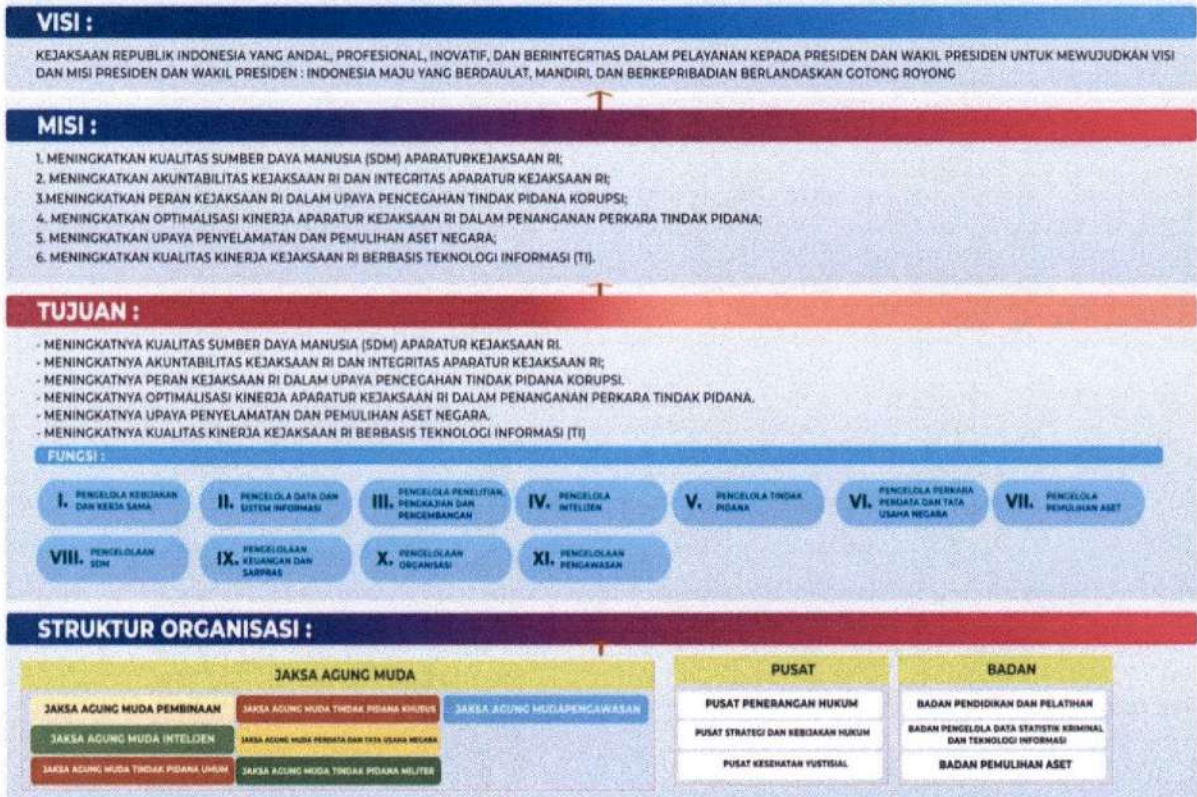
Unit	ID Unit Kerja	Uraian Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi; dan</li> <li>5. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.</li> </ol>	
Pusat Pemulihan Aset	P-PA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang pemulihan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. pelaksanaan kegiatan pemulihan aset nasional dan transnasional yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>3. pendampingan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. pelaksanaan pengendalian dan pengurusan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. melaksanakan koordinasi dengan jaringan kerja sama pemulihan aset nasional dan transnasional;</li> <li>6. pelaksanaan pengelolaan basis data pemulihan aset dan pertukaran informasi;</li> <li>7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; dan</li> <li>8. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pemulihan Aset.</li> </ol>	KJSB-07.01, KJSB-07.02, KJSB-07.03, KJSB-07.04, KJSB-07.05, KJSB-07.06
Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	P-ST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>3. pelaksanaan kerja sama analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>5. pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>6. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;</li> <li>7. pembinaan dan penilaian karya tulis ilmiah di lingkungan Kejaksaan; dan</li> <li>8. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.</li> </ol>	KJSB-05, KJSB-06

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa secara umum proses bisnis utama Kejaksaan dijalankan oleh 5(lima) unit eselon satu yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan satu unit kerja pendukung yaitu Pusat Pemulihan Aset. Sedangkan proses bisnis pendukung Kejaksaan dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, serta Pusat Penerangan Hukum.

### C. Arsitektur Target Proses Bisnis

#### 1. Pemetaan visi, misi, dan tujuan Kejaksaan Republik Indonesia

Pemetaan visi, misi, dan tujuan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta hasil diskusi dengan Tim Pelaksanaan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia. Kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan Kejaksaan Republik Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1.4.

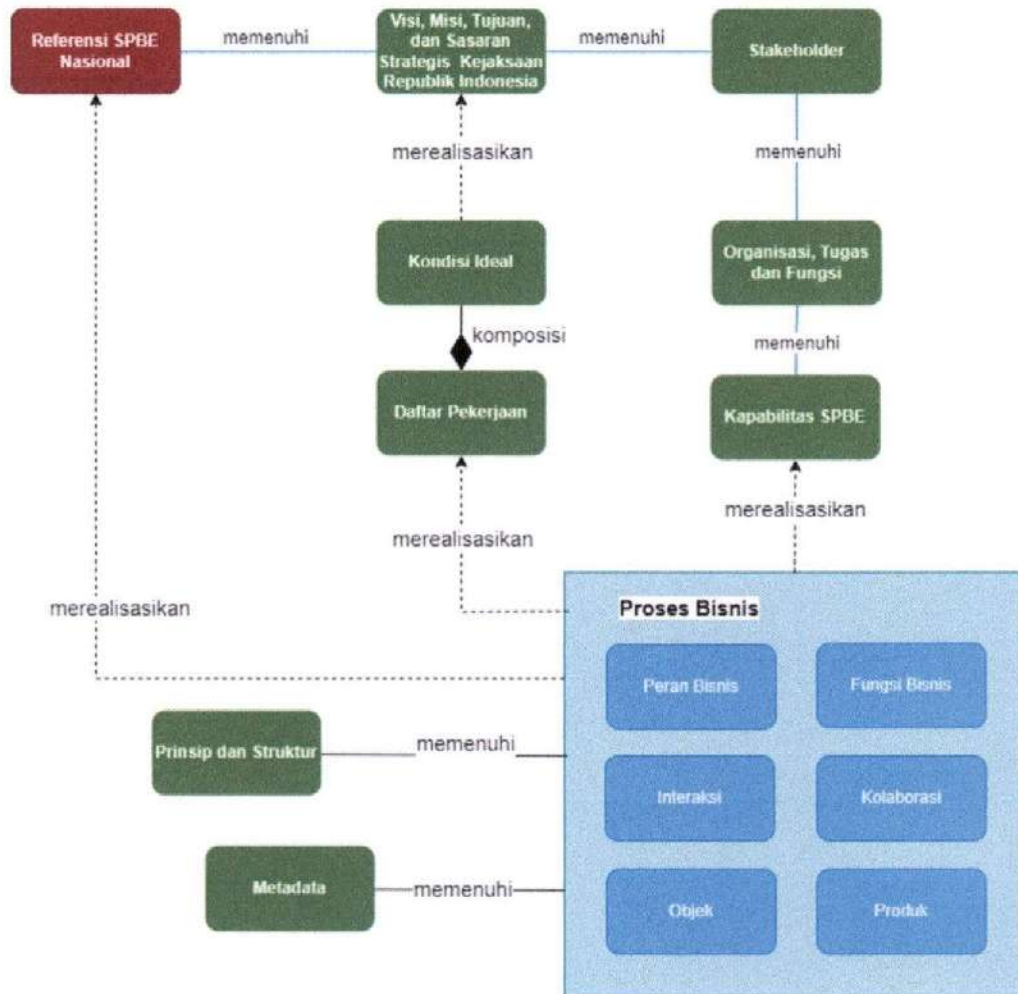


Gambar 1.4. Kerangka Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan Republik Indonesia

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Kejaksaan menjalankan 11(sebelas) fungsi yang diterjemahkan ke dalam proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis sumber daya. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh struktur kelembagaan yang terdiri atas 7(tujuh) unit kerja Jaksa Agung Muda, 3(tiga) unit kerja Pusat, dan 3(tiga) unit kerja Badan.

#### 2. Kerangka Arsitektur Target Proses Bisnis

Kerangka arsitektur target proses bisnis menggambarkan keterkaitan antara proses bisnis dengan arsitektur spbe nasional dan pencapaian visi, misi, dan tujuan Kejaksaan. Kerangka arsitektur proses bisnis ditunjukkan oleh Gambar 1.5.



**Gambar 1.5. Kerangka Arsitektur Target Proses Bisnis SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

Kerangka arsitektur target proses bisnis di atas menunjukkan bahwa Referensi SPBE Nasional menjadi acuan utama yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kejaksaan. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan juga menjadi acuan dalam penetapan stakeholders, organisasi, tugas dan fungsi Kejaksaan. Arsitektur proses bisnis meliputi pemetaan peran bisnis, fungsi bisnis, interaksi, kolaborasi, objek, dan produk yang mengacu pada SPBE Nasional, prinsip, struktur, serta metadata proses bisnis.

### 3. Metadata Arsitektur Target Proses Bisnis

Metadata arsitektur target proses bisnis ditunjukkan pada tabel 1.5. berikut.

**Tabel 1.5. Metadata Arsitektur Target Proses Bisnis**

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
<b>Proses Bisnis Utama (Inti)</b>								
KJSB-04	Pengelolaan Intelijen	Penyelenggaraan fungsi Intelijen Penegakan Hukum	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum, RAB 05.02 Keamanan	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen		JAM-INTEL JAM-PIDSUS	KJSL-04
KJSB-04.01	Pengelolaan Penyelidikan	Penyelenggaraan fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen	RAB 05.01.04.01 Pengelolaan Penyelidikan RAB 05.01.04.02 Pengelolaan Penyadapan	JAM-INTEL	KJSL-04.01,
KJSB-04.02	Pengelolaan Pengamanan	Penyelenggaraan fungsi pengamanan pelaksanaan pembangunan	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen	RAB 05.01.04.02 Pengelolaan Pengamanan	JAM-INTEL	KJSL-04.02,
KJSB-04.03	Pengelolaan Penggalangan	Penyelenggaraan penggalangan dan Kerjasama antar Lembaga intelijen	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen	RAB 05.01.04.03 Pengelolaan Penggalangan	JAM-INTEL	KJSL-04.03,
KJSB-04.04	Pengawasan Multimedia	Melakukan pengawasan multimedia di wilayah hukum Republik Indonesia.	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum RAB 05.02 Keamanan	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen	RAB 05.01.04.04 Pengawasan Multimedia	JAM-INTEL	KJSL-04.04,
KJSB-05	Pengelolaan Tindak Pidana	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara untuk melaksanakan penegakan hukum	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.05 Pengelolaan Tindak Pidana		JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, P-STJ	KJSL-05
KJSB-05.01	Pengelolaan Pra Penuntutan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Pra Penuntutan	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAB 05.01.05.01 Pengelolaan Pra Penuntutan	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	KJSL-05.01,
KJSB-05.02	Pengelolaan Penyidikan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi	RAB 05	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.05	RAB 05.01.05.02	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS,	KJSL-05.02,

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
		Kejaksanaan pada tahap Penyidikan	Ketertiban Umum dan Keselamatan		Pengelolaan Tindak Pidana	Pengelolaan Penyidikan RAB 05.01.05.02 Pengelolaan Forensik Digital	JAM-PIDMIL	
KJSB-05.03	Pengelolaan Penuntutan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan pada tahap Penuntutan	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAB 05.01.05.03 Pengelolaan Penuntutan	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	KJSL-05.03,
KJSB-05.04	Pengelolaan Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan pada tahap Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAB 05.01.05.04 Pengelolaan Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, JAM-INTEL	KJSL-05.04,
KJSB-06	Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan di bidang perdata dan tata usaha negara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		JAM-DATUN, P-STJ	KJSL-06,
KJSB-06.01	Penegakan Hukum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam melakukan penegakan hukum perdata dan tata usaha negara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAB 05.01.06.01 Penegakan Hukum	JAM-DATUN	KJSL-06.01,
KJSB-06.02	Bantuan Hukum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan kepada masyarakat dan instansi dalam melaksanakan Bantuan Hukum	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAB 05.01.06.02 Bantuan Hukum	JAM-DATUN	KJSL-06.02,
KJSB-06.03	Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam melaksanakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan instansi	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAB 05.01.06.03 Pelayanan Hukum	JAM-DATUN	KJSL-06.03,

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
KJSB-06.04	Pertimbangan Hukum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada masyarakat	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAB 05.01.06.04 Pertimbangan Hukum	JAM-DATUN	KJSL-06.04,
KJSB-06.05	Tindakan Hukum Lain	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam menangani tindakan hukum lainnya	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAB 05.01.06.05 Tindakan Hukum Lain	JAM-DATUN	KJSL-06.05,
KJSB-07	Pengelolaan Pemulihan Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan untuk melaksanakan pengelolaan pemulihan asset dari hasil penanganan perkara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset		P-PA	KJSL-07
KJSB-07.01	Penelusuran Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam hal melaksanakan penelusuran asset-asset dalam penanganan perkara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.01 Penelusuran Aset	P-PA	KJSL-07.01,
KJSB-07.02	Pengamanan Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengamanan asset yang telah disita oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.02 Pengamanan Aset	P-PA	KJSL-07.02,
KJSB-07.03	Pemeliharaan Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pemeliharaan barang-barang atau	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.03 Pemeliharaan Aset	P-PA	KJSL-07.03,

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
		aset yang telah disita oleh Kejaksaan						
KJSB-07.04	Perampasan Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset-aset penanganan perkara	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.04 Perampasan Aset	P-PA	KJSL-07.04,
KJSB-07.05	Pengembalian Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian aset-aset yang dirampas Kejaksaan	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.05 Pengembalian Aset	P-PA	KJSL-07.05,
KJSB-07.06	Pemusnahan/ Penghapusan Aset	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan atau penghapusan aset	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01 Hukum	RAB 05.01.07 Pengelolaan Pemulihan Aset	RAB 05.01.07.06 Pemusnahan/ Penghapusan Aset	P-PA	KJSL-07.06,
<b>Proses Pendukung</b>								
KJSB-01	Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan keputusan Jaksa Agung maupun kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum, RAB 01 Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara, RAB 01.07 Hubungan Luar Negeri	RAB 09.07.01 Pengelolaan Kebijakan RAB 01.07.01 Pengelolaan Kerjasama		JAM-BIN	KJSL-01
KJSB-01.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09.07.01 Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	RAB 09.07.01.01 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	JAM-BIN	KJSL-01.01

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
KJSB-01.02	Pengelolaan Naskah Dinas Pengaturan lainnya	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam mengelola naskah dinas yang ada di lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09.07.01 Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	RAB 09.07.01.02 Pengelolaan Naskah Dinas Pengaturan lainnya	JAM-BIN	KJSL-01.02
KJSB-01.03	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan Kerjasama antar instansi dalam negeri republik indonesia	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09.07.01 Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	RAB 09.07.01.03 Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri	JAM-BIN	KJSL-01.03
KJSB-01.04	Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan Kerjasama antar instansi luar negeri republik indonesia	RAB 01 Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri	RAB 01.07 Hubungan Luar Negeri	RAB 01.07.01 Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	RAB 01.07.01.01 Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	JAM-BIN	KJSL-01.04
KJSB-02	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pada Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi RAB 09.05.01 Pengelolaan Data RAB 09.06.01 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		P-DAS	KJSL-02
KJSB-02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kejaksaan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.03.01 Pengelolaan Sistem Informasi RAB 09.05.01 Pengelolaan Data RAB 09.06.01	RAB 09.03.01.01 Pengelolaan Sistem Informasi Kejaksaan RAB 09.05.01.01 Pengelolaan Data Kejaksaan RAB 09.05.01.02	P-DAS	KJSL-02.01

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
					Manajemen SPBE	Manajemen Perlindungan Data Pribadi 09.06.01.01 Manajemen Data SPBE		
KJSB-02.02	Pengelolaan Infrastruktur TIK	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.03.01 Pengelolaan Sistem Informasi RAB 09.06.01 Manajemen SPBE	RAB 09.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur TIK	P-DAS	KJSL-02.02
KJSB-02.03	Pengelolaan Keamanan Informasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan keamanan informasi untuk seluruh laynana yang ada di lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.03.01 Pengelolaan Sistem Informasi RAB 09.06.01 Manajemen SPBE	RAB 09.03.01.03 Pengelolaan Keamanan Informasi	P-DAS, Tim CSIRT	KJSL-02.03
KJSB-02.04	Pengelolaan, Analisis Data dan Statistik	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan analisis data dan statistik yang ada di lingkungan Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.01 Pengelolaan Data	RAB 09.05.01.03 Pengelolaan Analisis Data dan Statistik	P-DAS	KJSL-02.04
KJSB-02.05	Perpustakaan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.01 Pengelolaan Sistem Informasi	RAB 09.03.01.04 Pengelolaan Perpustakaan	P-DAS	KJSL-02.05
KJSB-02.06	Pelayanan Informasi Publik	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.03	RAB 09.03.03.01 Pelayanan Informasi Publik	P-PEN	KJSL-02.06

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
		memberikan pelayanan informasi kepada publik yang akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan			Manajemen Komunikasi Publik			
KJSB-02.07	Pengelolaan Media dan Kehumasan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam mengelola semua media serta dapat memberikan segala informasi penting mengenai organisasi kepada publik	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09.03.03 Manajemen Komunikasi Publik	RAB 09.03.03.02 Pengelolaan Media dan Kehumasan	P-PEN	KJSL-02.07
KJSB-02.08	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 05.01 Hukum RAB 09.03 Informasi	RAB 05.01.04 Pengelolaan Intelijen RAB 09.03.03 Manajemen Komunikasi Publik	RAB 05.01.04.04 Penerangan Hukum RAB 09.03.03.03 Penyuluhan Hukum	P-PEN	KJSL-02.08
KJSB-03	Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pengkajian, penelitian dan pengelolaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB 05 Ketertiban Umum dan Keselamatan RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 05.01 Hukum RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAB 06.03.01 Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		P-STJ, BRIN	KJSL-03
KJSB-03.01	Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan penelitian pengkajian dan pengembangan	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAB 06.03.01 Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	RAB 06.03.01.01 Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	P-STJ, BRIN	KJSL-03.01
KJSB-03.02	Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pemanfaatan hasil penelitian,	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAB 06.03.01 Pengelolaan Penelitian, Pengkajian,	RAB 06.03.01.02 Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	P-STJ, BRIN	KJSL-03.02

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
		pengkajian dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi			dan Pengembangan			
<b>Proses Sumber Daya</b>								
KJSB-08	Pengelolaan SDM	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 06.01 Pendidikan RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 06.01.01 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM		JAM-BIN	KJSL-08
KJSB-08.01	Perencanaan dan Pengadaan SDM	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam perencanaan dan pengadaan SDM sesuai dengan kebutuhan instansi	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM	RAB 09.06.02.01 Perencanaan dan Pengadaan SDM	JAM-BIN	KJSL-08.01
KJSB-08.02	Pengembangan SDM	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengembangan SDM	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM	RAB 09.06.02.02 Pengembangan SDM	JAM-BIN	KJSL-08.02
KJSB-08.03	Pengelolaan Diklat	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan serta pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan	RAB 06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01 Pendidikan	RAB 06.01.01 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	RAB 06.01.01.01 Pengelolaan Pendidikan RAB 06.01.01.02 Pengelolaan Pelatihan	BAN-DL	KJSL-08.03
KJSB-08.04	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan kinerja pegawai	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM	RAB 09.06.02.03 Pengelolaan Kinerja Pegawai	JAM-BIN	KJSL-08.04
KJSB-08.05	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM	RAB 09.06.02.04 Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	JAM-BIN	KJSL-08.05

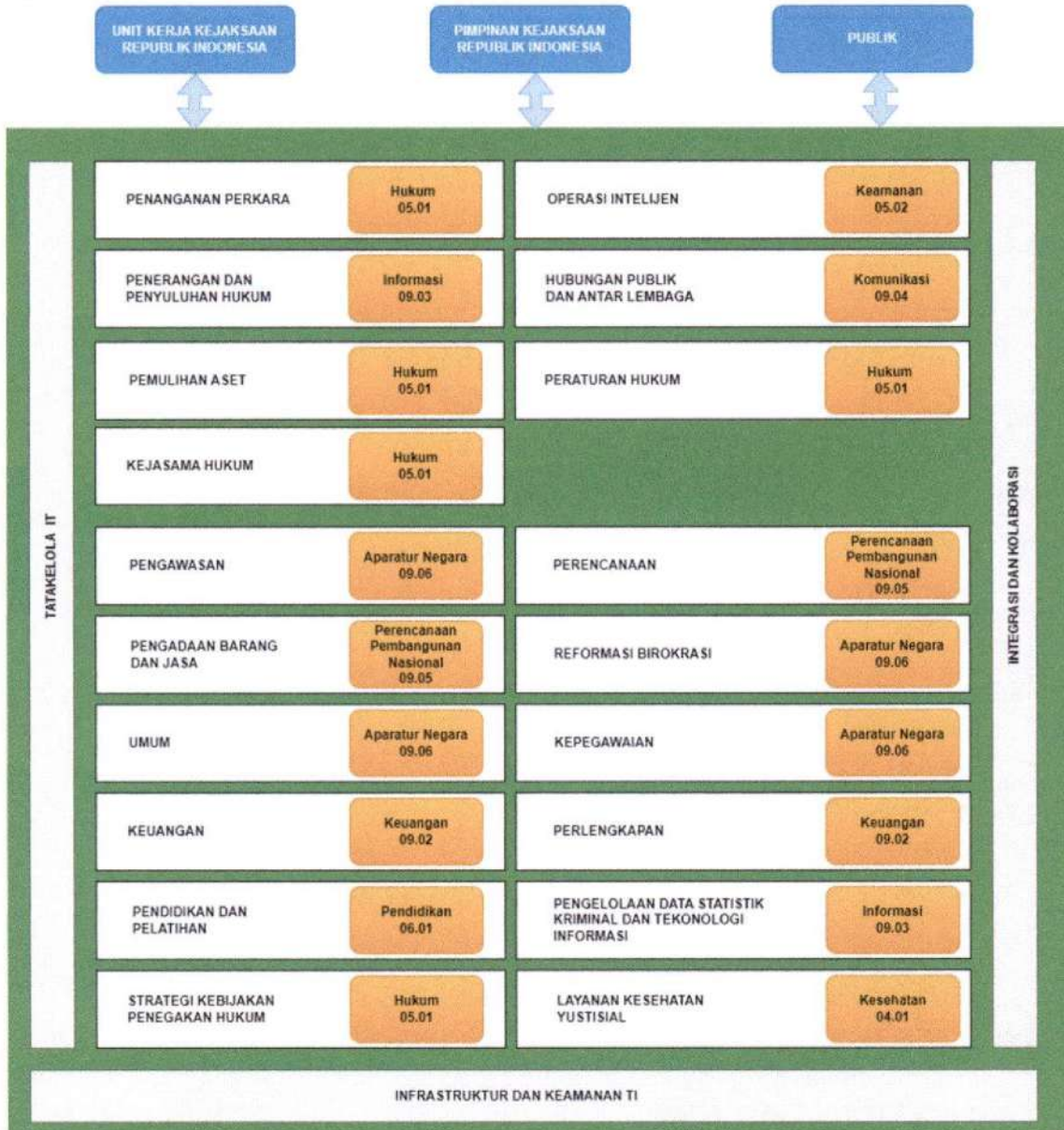
ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
KJSE-08.06	Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan perlindungan dan bantuan hukum internal	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.02 Pengelolaan SDM	RAB 09.06.02.05 Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal	JAM-BIN	KJSL-08.06
KJSE-09	Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan keuangan dan sarana prasana pegawai	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras		JAM-BIN	KJSL-09
KJSE-09.01	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan rencana program dan anggaran Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras RAB 09.05.01 Perencanaan Pembangunan Program	RAB 09.02.01.01 Perencanaan Anggaran RAB 09.05.01.01 Perencanaan Program	JAM-BIN	KJSL-09.01
KJSE-09.02	Pelaksanaan Anggaran	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan serta penyerapan anggaran Kejaksaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	RAB 09.02.01.02 Pelaksanaan Anggaran	JAM-BIN	KJSL-09.02
KJSE-09.03	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan pendapatan dan piutang negara	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	RAB 09.02.01.03 Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	JAM-BIN	KJSL-09.03
KJSE-09.04	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan monitoring dan evaluasi	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras RAB 09.05.01 Perencanaan Pembangunan Program	RAB 09.02.01.04 Monitoring dan Evaluasi Anggaran RAB 09.05.01.2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja	JAM-BIN	KJSL-09.04
KJSE-09.05	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan tugas dan fungsi	RAB 09	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.01	RAB 09.02.01.05	JAM-BIN	KJSL-09.05

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
		Kejaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa	Pemerintahan Umum		Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	Pengadaan Barang dan Jasa		
KJSB-09.06	Pengelolaan Barang Milik Negara	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan barang milik negara	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	RAB 09.02.01.06 Pengelolaan Barang Milik Negara	JAM-BIN	KJSL-09.06
KJSB-10	Pengelolaan Organisasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan organisasi Kejaksanaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 09.06 Aparatur Negara RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09.05.02 Pengelolaan Organisasi RAB 09.06.03 Pengelolaan Reformasi Birokrasi		JAM-BIN	KJSL-10
KJSB-10.01	Penataan Lembaga dan Ketatalaksanaan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam penataan Lembaga dan tatalaksanaan Kejaksanaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.05.02 Pengelolaan Organisasi	RAB 09.05.02.01 Pengelolaan Sistem Penataan Lembaga RAB 09.05.02.02 Pengelolaan Sistem Ketatalaksanaan	JAM-BIN	KJSL-10.01
KJSB-10.02	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam reformasi di seluruh satuan kerja Kejaksanaan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.06.03 Pengelolaan Reformasi Birokrasi	RAB 09.06.03.01 Pengelolaan Sistem Pelaksanaan Reformasi Birokrasi RAB 09.06.03.02 Pengelolaan Pengawasan Reformasi Birokrasi	JAM-BIN	KJSL-10.02
KJSB-10.03	Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan Ketatausahaan dan keprotokolan	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09.07.01 Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	RAB 09.07.01.01 Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	JAM-BIN	KJSL-10.03
KJSB-11	Pengelolaan Pengawasan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan pengawasan dalam segala aspek	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.02 Keuangan RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras RAB 09.06.01		JAM-WAS	KJSL-11

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
					Manajemen SPBE RAB 09.06.04 Pengelolaan Pengawasan			
KJSB-11.01	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan system pengawasan internal	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras RAB 09.06.01 Manajemen SPBE RAB 09.06.04 Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	RAB 09.06.04.01 Pengelolaan Sistem Pengawasan Keuangan RAB 09.06.04.02 Pengelolaan Sistem Pengawasan Kode Etik Aparatur Negara RAB 09.06.04.02 Pengelolaan Sistem Pengawasan Tata Laksana Organisasi RAB 09.06.01.02 Pengelolaan Audit Infrastruktur TIK RAB 09.06.01.03 Pengelolaan Audit Keamanan Informasi RAB 09.06.01.04 Pengelolaan Audit Aplikasi SPBE	JAM-WAS	KJSL-11.01
KJSB-11.02	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan hasil tindak lanjut pengawasan dari seluruh aspek	RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09.02.01 Pengelolaan Keuangan dan Sarpras RAB 09.06.01 Manajemen SPBE RAB 09.06.04 Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	RAB 09.06.04.01 Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Keuangan RAB 09.06.04.02 Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Kode Etik Aparatur Negara RAB 09.06.04.02 Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Tata Laksana Organisasi RAB 09.06.01.02 Pengelolaan Tindak Lanjut Audit Infrastruktur TIK	JAM-WAS	KJSL-11.02

ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	ID Unit Kerja (Dependency)	ID Meta Data Terkait
						RAB 09.06.01.03 Pengelolaan Tindak Lanjut Audit Keamanan Informasi RAB 09.06.01.04 Pengelolaan Tindak Lanjut Audit Aplikasi SPBE		
KJSB-12	Pengelolaan Kesehatan Yustisia	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan Kesehatan yustisia	RAB 04 Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.01 Pengelolaan Kesehatan Yustisia		P-KY	KJSL-12
KJSB-12.01	Pengelolaan Kesehatan Umum	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam kesehatan umum yang	RAB 04 Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.01 Pengelolaan Kesehatan Yustisia	RAB 04.01.01.01 Pengelolaan Kesehatan Umum	P-KY	KJSL-12.01
KJSB-12.02	Pengelolaan Kesehatan Yustisia	Pengelolaan Kesehatan Dalam Rangka Penegakan Hukum	RAB 04 Kesehatan	RAB 04.01 Kesehatan	RAB 04.01.01 Pengelolaan Kesehatan Yustisia	RAB 04.01.01.02 Pengelolaan Kesehatan Yustisia	P-KY	KJSL-12.02

Metadata Arsitektur Target proses bisnis di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 65 proses bisnis level 4 yang mengacu pada arsitektur proses bisnis SPBE Nasional. Selanjutnya dari proses-proses bisnis tersebut menghasilkan building block arsitektur proses bisnis SPBE Kejaksaan RI yang ditunjukkan pada gambar 1.6 berikut.

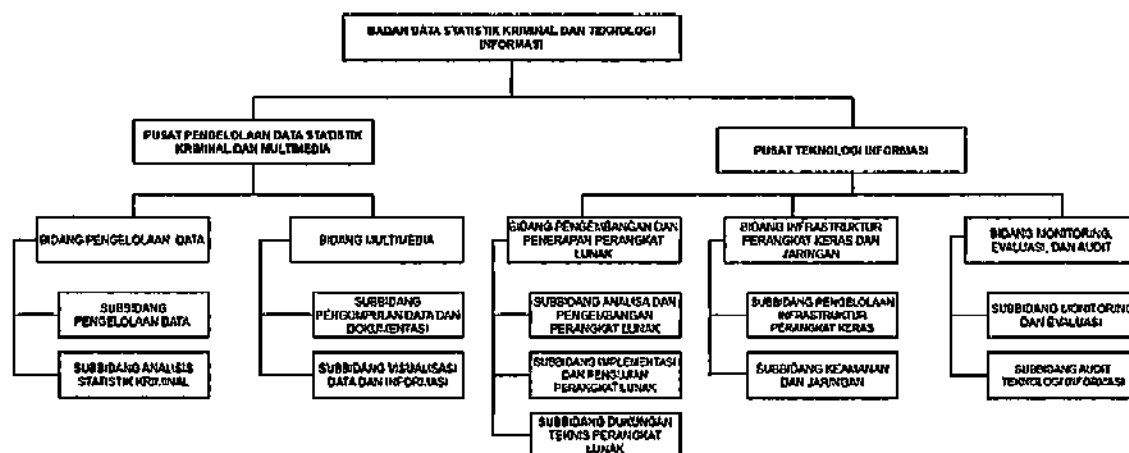


**Gambar 1.6. Building Block Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

*Building block* arsitektur proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 19 proses bisnis level 3 yang mengacu kepada proses bisnis level 2 SPBE Nasional. Proses-proses bisnis tersebut dijalankan dengan mengikuti kaidah-kaidah tata Kelola IT, Infrastruktur dan Keamanan TI, Integrasi dan Kolaborasi, serta berjalan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja dan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, serta publik selaku pengguna layanan Kejaksaan Republik Indonesia.

Metadata arsitektur proses bisnis target Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki beberapa perubahan konsep pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan konsep pengelolaan teknologi informasi yang lebih baik dan komprehensif, maka perlu dilakukan perubahan struktur pengelolaan Teknologi Informasi di Kejaksaan Republik Indonesia menjadi suatu Badan yang khusus menangani

pengelolaan data statistik kriminal, dan teknologi informasi. Rancangan struktur badan pengelolaan yang dimaksud, ditunjukkan pada gambar 1.7.



**Gambar 1.7. Rancangan Struktur Badan Pengelola Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia**

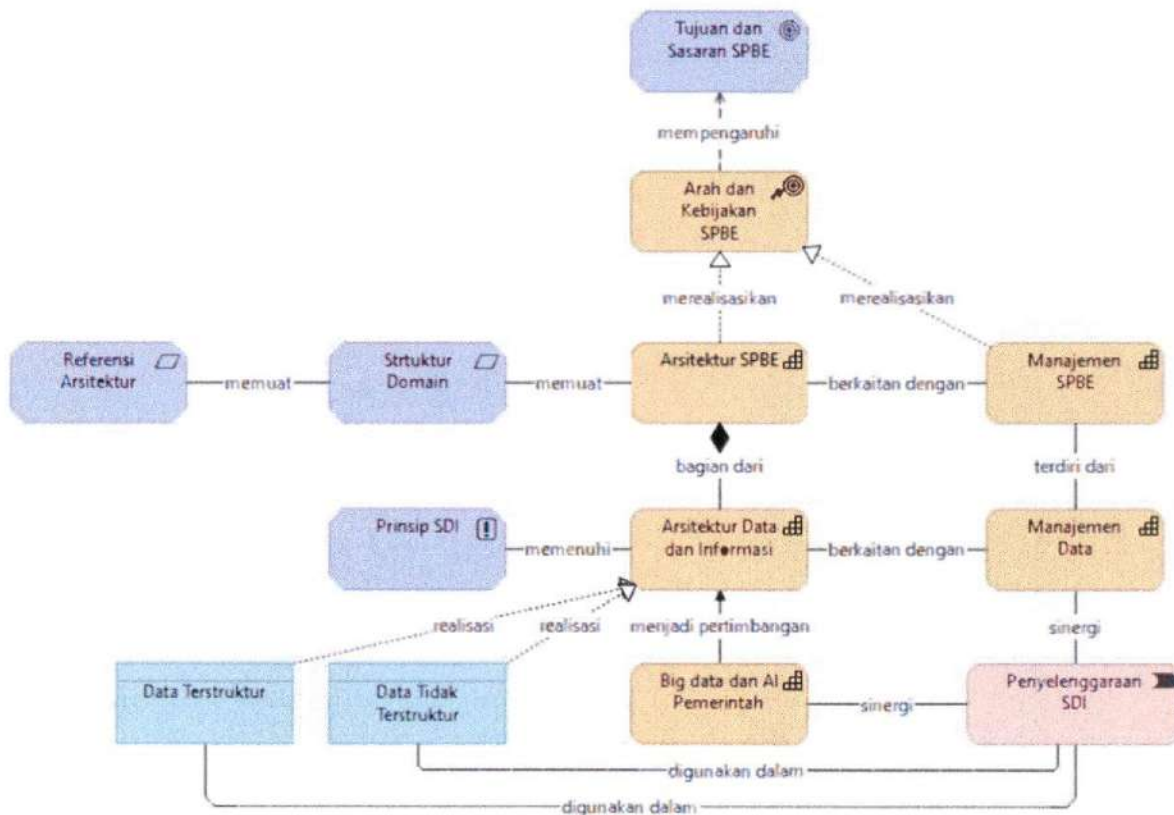
Rancangan Struktur di atas menggambarkan bahwa idealnya badan khusus pengelola data statistik kriminal dibagi menjadi 2 pusat, yakni yang berfokus pada proses bisnis dalam pengelolaan data serta yang berfokus pada proses bisnis pengelolaan teknologi informasi. Rancangan struktur badan pada pusat pengelolaan data statistik dibentuk mengacu pada proses bisnis pengelolaan data hingga menjadi informasi, sedangkan pusat pengelolaan teknologi informasi dibentuk mengacu kepada kaidah *Software Development Life Cycle* (SDLC), audit sistem informasi, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.

## BAB II ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor Tahun 2022 disebutkan bahwa untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE Nasional, instansi pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai pengelola Satu Data Indonesia (SDI).

Keterlibatan Arsitektur Data dan Informasi dengan tujuan SPBE, manajemen data, dan SDI dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2.1. Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan SPBE, manajemen data, dan SDI.**

### B. Arsitektur Data dan Informasi Eksisting

Arsitektur Data pada Kejaksaan Republik Indonesia secara umum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal.

#### 1. Data Internal

Data internal di Kejaksaan Republik Indonesia dikelompokkan sebagai data umum yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Data umum terdiri dari 37 data yang dikelola masing-masing unit kerja. Data internal Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut.

**Tabel 2.1. Data Internal Kejaksaan Republik Indonesia**

No	Nama Data	Unit Kerja
1	Data Pengawasan	JAM-WAS
2	Data Inspeksi	JAM-WAS
3	Data Penilaian Unit Kerja	JAM-WAS
4	Data Penilaian Pegawai	JAM-WAS, JAM-BIN
5	Data Hukuman Disiplin	JAM-WAS
6	Data Perencanaan Anggaran	JAM-BIN
7	Data Realisasi Anggaran	JAM-BIN

No	Nama Data	Unit Kerja
8	Data Perencanaan Organisasi	JAM-BIN
9	Data Perencanaan Program Kerja	JAM-BIN
10	Data Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana	JAM-BIN
11	Data Monitoring dan Evaluasi	JAM-BIN
12	Data Kinerja Unit Kerja	JAM-BIN
13	Data Pengadaan Barang Dan Jasa	JAM-BIN
14	Data Reformasi Birokrasi	JAM-BIN
15	Data Pemeliharaan Rumah Tangga	JAM-BIN
16	Data Formasi Pegawai	JAM-BIN
17	Data Pengadaan Pegawai	JAM-BIN
18	Data Mutasi Pegawai	JAM-BIN
19	Data Karir Pegawai	JAM-BIN
20	Data Angka Kredit Pegawai	JAM-BIN
21	Data Barang Milik Negara (BMN)	JAM-BIN
22	Data Sarana dan Prasarana	JAM-BIN
23	Data Pemberhentian Pegawai	JAM-BIN
24	Data Pensiun	JAM-BIN
25	Data Perbendaharaan	JAM-BIN
26	Data Pendapatan Negara	JAM-BIN
27	Data Piutang Negara	JAM-BIN
28	Data Pelaporan Keuangan	JAM-BIN
29	Data Perjalanan Dinas	JAM-BIN
30	Data Gaji Dan Tunjangan	JAM-BIN
31	Data Penelitian Dan Penerbitan SPM	JAM-BIN
32	Data Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	BAN-DIK
33	Data Statistik Kriminal	P-DAS
34	Data Absensi Pegawai	P-DAS
35	Data Traffic Jaringan	P-DAS
36	Data Buku Perpustakaan	P-DAS
37	Data Naskah Dinas	JAM-BIN

## 2. Data Eksternal

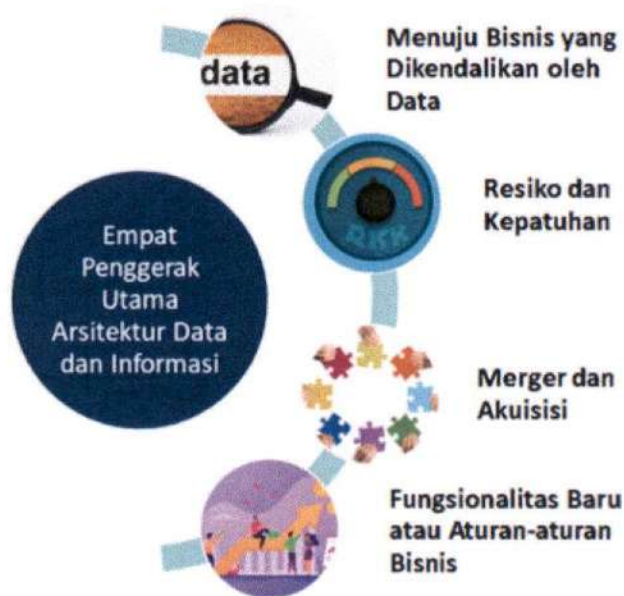
Data eksternal Kejaksaan Republik Indonesia dikelompokkan sebagai data khusus yang mendukung proses bisnis utama di Kejaksaan Republik Indonesia. Data eksternal Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2. Data Eksternal Kejaksaan Republik Indonesia**

No.	Nama Data	Unit Kerja
1	Data Informasi Perkara	JAM-PIDSUS, JAM-PIDUM, JAM-INTEL, JAM-DATUN, JAM-PIDMIL
2	Data Tedakwa	JAM-PIDSUS, JAM-PIDUM
3	Data Barang Bukti	JAM-PIDSUS, JAM-PIDUM, P-PA
4	Data Jaksa	JAM-PIDSUS, JAM-PIDUM, JAM-INTEL, JAM-DATUN, JAM-PIDMIL
5	Data Bantuan dan Pertimbangan Hukum	JAM-PIDSUS, JAM-PIDUM
6	Data Penyelamatan Keuangan Negara	JAM-PIDSUS
7	Data Aliran Kepercayaan	JAM-INTEL
8	Data Orang Asing	JAM-INTEL
9	Daftar Pencarian Orang	JAM-INTEL
10	Data Pelacakan Aset	JAM-INTEL, P-PA
11	Data Produksi Intelijen	JAM-INTEL
12	Data Pencegahan dan Penangkalan Barang Asing	JAM-INTEL
13	Data Forensik	JAM-INTEL
14	Data Pelayanan Hukum	JAM-DATUN
15	Data Penerangan Hukum	JAM-INTEL
16	Data Kontrak dan Kerjasama Instansi	JAM-DATUN
17	Data Perkara Koneksitas	JAM-PIDMIL
18	Data Hubungan Masyarakat	P-PEN
19	Data Barang Rampasan	PPA (P4)
20	Daftar Peraturan Hukum	PUSPENKUM (P1)

## C. Arsitektur Target Data dan Informasi

Tahap awal dalam penyusunan arsitektur data dan informasi adalah optimalisasi arsitektur data dan informasi melalui taktik business driven. Pada fase ini, Kejaksaan Republik Indonesia akan menentukan fokusnya untuk mengoptimalkan arsitektur data dan informasi berdasarkan driver bisnis yang umumnya dirasakan oleh sebagian besar organisasi sebagaimana dilihat pada gambar 2.2.



**Gambar 2.2. Empat Penggerak Utama arsitektur Data dan Informasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, penggerak utama penyusunan arsitektur data dan informasi berkaitan dengan resiko dan kepatuhan serta menuju bisnis yang dikendalikan oleh data.

Arsitektur Data dan Informasi SPBE dapat ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut

**Tabel 2.3. Data dan Informasi SPBE**

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-04.01.01	Data Pengelolaan Kesehatan Yustisia	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan Kesehatan yustisial	Terbatas	Data Kesehatan Yustisial	P-KY	P-KY	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan			KJSB-12
KJSD-05.01.01	Data Pengelolaan Intelijen	Data Penyelenggaraan fungsi Intelijen Penegakan Hukum	Terbatas	Data Hukum	JAM-INTEL JAM-PIDSUS	JAM-INTEL	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum			KJSB-04
KJSD-05.01.01.01	Data Pengelolaan Penyelidikan	Data Penyelenggaraan fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum	Terbatas	Data Hukum	JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Data Pengelolaan Intelijen		KJSB-04.01
KJSD-05.01.01.02	Data Pengelolaan Pengamanan	Data Penyelenggaraan fungsi pengamanan pelaksanaan pembangunan	Terbatas	Data Hukum	JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Data Pengelolaan Intelijen		KJSB-04.02
KJSD-05.01.01.03	Data Pengelolaan Penggalangan	Data Penyelenggaraan penggalangan dan Kerjasama antar Lembaga intelijen	Terbatas	Data Hukum	JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Data Pengelolaan Intelijen		KJSB-04.03
KJSD-05.01.01.04	Data Pengawasan Multimedia	Data Melakukan pengawasan multimedia di wilayah hukum Republik Indonesia.	Terbatas	Data Hukum	JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Data Pengelolaan Intelijen		KJSB-04.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Pemanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-05.01.02	Data Pengelolaan Tindak Pidana	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara untuk melaksanakan penegakan hukum	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, P-STJ	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum			KJSB-05
KJSD-05.01.02.01	Data Pengelolaan Penyelidikan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Penyelidikan	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-05.01
KJSD-05.01.02.02	Data Pengelolaan Pra Penuntutan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Pra Penuntutan	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-05.01
KJSD-05.01.02.03	Data Pengelolaan Penyidikan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Penyidikan	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-05.02
KJSD-05.01.02.04	Data Pengelolaan Penuntutan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Penuntutan	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-05.03
KJSD-05.01.02.05	Data Pengelolaan Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan pada tahap Upaya Hukum,	Terbatas	Data Hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, JAM-INTEL	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-05.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
		Eksekusi, dan Eksaminasi									
KJSD-05.01.02.06	Data Statistik Kriminal	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan analisis data dan statistik yang ada di lingkungan Kejaksaan	Terbuka	Data Hukum	P-DAS	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Data Pengelolaan Tindak Pidana		KJSB-02.04
KJSD-05.01.03	Data Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN, P-STJ	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum			KJSB-06
KJSD-05.01.03.01	Data Penegakan Hukum	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum perdata dan tata usaha negara	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.03 Data Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		KJSB-06.01
KJSD-05.01.03.02	Data Bantuan Hukum	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan kepada masyarakat dan instansi dalam melaksanakan Bantuan Hukum	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.03 Data Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		KJSB-06.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-05.01.03.03	Data Pelayanan Hukum	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan instansi	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.03 Data Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		KJSB-06.03
KJSD-05.01.03.04	Data Pertimbangan Hukum	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada masyarakat	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.03 Data Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		KJSB-06.04
KJSD-05.01.03.05	Data Tindakan Hukum Lain	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam menangani Tindakan hukum lainnya	Terbatas	Data Hukum	JAM-DATUN	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.03 Data Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		KJSB-06.05
KJSD-05.01.04	Data Pengelolaan Pemulihan Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan untuk melaksanakan pengelolaan pemulihan asset dari hasil penanganan perkara	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum			KJSB-07

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-05.01.04.01	Data Penelusuran Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam hal melaksanakan penelusuran asset-aset dalam penanganan perkara	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum			KJSB-07.01
KJSD-05.01.04.02	Data Pengamanan Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengaman asset yang telah disita oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.04 Data Pengelolaan Pemulihan Aset		KJSB-07.02
KJSD-05.01.04.03	Data Pemeliharaan Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pemeliharaan barang-barang atau asset yang telah disita oleh Kejaksaan	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.04 Data Pengelolaan Pemulihan Aset		KJSB-07.03
KJSD-05.01.04.04	Data Perampasan Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset-aset penanganan perkara	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.04 Data Pengelolaan Pemulihan Aset		KJSB-07.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-05.01.04.05	Data Pengembalian Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian aset-aset yang dirampas Kejaksaan	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.04 Data Pengelolaan Pemulihan Aset		KJSB-07.05
KJSD-05.01.04.06	Data Pemusnahan/ Penghapusan Aset	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan atau penghapusan aset	Terbatas	Data Hukum	P-PA	P-DAS	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.04 Data Pengelolaan Pemulihan Aset		KJSB-07.06
KJSD-06.03.01	Data Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pengkajian, penelitian dan pengelolaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbatas		P-STJ	P-DAS	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		BRIN	KJSB-03
KJSD-09.02.01	Data Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan keuangan dan sarana prasana pegawai	Terbatas	Data Keuangan	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan			KJSB-09.02.01
KJSD-09.02.01.01	Data Pelaksanaan Anggaran	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam	Terbuka	Data Keuangan	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan	RAD.09.02.01 Data Pengelolaan		KJSB-09.02.01.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
		pelaksanaan serta penyerapan anggaran Kejaksanaan							Keuangan dan Sarpras		
KJSD-09.02.01.03	Data Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan pendapatan dan piutang negara	Terbatas	Data Keuangan	JAM-BIN JAM-PIDSUS	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan	RAD.09.02.01 Data Pengelolaan Keuangan dan Sarpras		KJSB-09.03
KJSD-09.02.01.04	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa	Terbuka	Data Aset	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan	RAD.09.02.01 Data Pengelolaan Keuangan dan Sarpras		KJSB-09.05
KJSD-09.02.01.05	Data Pengelolaan Barang Milik Negara	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam pengelolaan barang milik negara	Terbuka	Data Aset	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan	RAD.09.02.01 Data Pengelolaan Keuangan dan Sarpras		KJSB-09.06
KJSD-09.03.01	Data Pelayanan Informasi Publik	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik yang akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan	Terbuka	Data Informasi	P-PEN	P-PEN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi			KJSB-02.06
KJSD-09.03.02	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Data Dokumentasi dan Informasi Hukum pada	Terbuka	Data Informasi	JAM-BIN	P-DAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi			

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
		lingkungan Kejaksaan RI									
KJSD-09.05.01	Data Pengelolaan Organisasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan organisasi Kejaksaan	Terbatas	Data Pengelolaan Organisasi	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional RAD.09.06 Data Aparatur Negara RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara			KSJB-10
KJSD-09.05.01.01	Data Penataan Lembaga dan Ketatalaksanaan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penataan Lembaga dan tatalaksanaan Kejaksaan	Terbatas	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.05.01 Data Pengelolaan Organisasi		KSJB-10.01
KJSD-09.05.01.02	Data Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam reformasi di seluruh satuan kerja Kejaksaan	Terbatas	Data Reformasi Birokrasi	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparaturnegara	RAD.09.05.01 Data Pengelolaan Organisasi		KSJB-10.02
KJSD-09.06.01	Data Pengelolaan SDM	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatas	Data Aparatur Negara	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparaturnegara			KJSB-08

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-09.06.01.02	Data Pengembangan SDM	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengembangan SDM	Terbatas	Data Kepegawaian	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara			KJSB-08.02
KJSD-09.06.01.03	Data Pengelolaan Diklat	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan serta pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan	Terbatas	Data Kepegawaian	BAN-DL JAM-BIN	BAN-DL JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 Data Pengelolaan SDM		KJSB-08.03
KJSD-09.06.01.04	Data Pengelolaan Kinerja Pegawai	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan kinerja pegawai	Terbatas	Data Kepegawaian	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 Data Pengelolaan SDM		KJSB-08.04
KJSD-09.06.01.05	Data Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai	Terbatas	Data Kepegawaian	JAM-BIN	JAM-BIN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 Data Pengelolaan SDM		KJSB-08.05
KJSD-09.06.02	Data Pengelolaan Pengawasan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan pengawasan dalam segala aspek	Terbatas	Data Pengawasan Aparatur Negara	JAM-WAS	JAM-WAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara			KJSB-11

ID	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSD-09.06.02.01	Data Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan system pengawasan internal	Terbatas	Data Pengawasan Aparatur Negara	JAM-WAS	JAM-WAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.02 Data Pengelolaan Pengawasan		KJSB-11.01
KJSD-09.06.02.02	Data Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Data Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengelolaan hasil tindak lanjut pengawasan dari seluruh aspek	Terbatas	Data Pengawasan Aparatur Negara	JAM-WAS	JAM-WAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.02 Data Pengelolaan Pengawasan		KJSB-11.02
KJSD-09.07.01	Data Persuratan Dinas	Data Persuratan Dinas elektronik di lingkungan Kejaksaan RI	Terbatas	Data Kesekretariatan Negara	Semua Bidang	P-DAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data kesekretariatan negara			KSJB-10.03
KJSD-10.04.01	Data Data Subdomain Kejaksaan	Data website yang menggunakan subdomain Kejaksaan dalam rangka Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada lingkungan Kejaksaan	Terbatas		P-DAS	P-DAS	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya			KJSB-02.01
KSJD.09.04.01	Data E-Mail Kejaksaan	Data penggunaan email Kejaksaan	Terbatas	Data Komunikasi	P-DAS	P-DAS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komirikasi			

### BAB III ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Arsitektur Layanan SPBE merupakan pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan dari proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia. Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional dan regulasi terkait layanan Kejaksaan Republik Indonesia.

Arsitektur Layanan dituangkan dalam bentuk katalog. Metadata Arsitektur Layanan ini telah mengacu pada panduan Arsitektur SPBE Nasional.

#### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Struktur arsitektur layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penjabaran turunan dari struktur arsitektur layanan SPBE Nasional. Referensi arsitektur SPBE Nasional yang digunakan pada arsitektur layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Referensi Arsitektur Layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.25	Kesehatan	Layanan publik di bidang kesehatan
01.28	Hukum	Layanan publik di bidang hukum
01.43	Informasi	Layanan publik di bidang informasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/ instansi
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan

#### B. Arsitektur Layanan SPBE Eksisting

Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja di Kejaksaan Republik Indonesia, berikut ini disajikan daftar layanan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia pada tabel 3.2 berikut.

No	Layanan	Deskripsi Layanan	Unit Kerja
1.	Layanan Penanganan Perkara	Layanan yang diberikan kepada stakeholder dan pengguna layanan terkait kegiatan penanganan perkara baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, maupun tindak pidana militer dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum, hingga eksekusi terhadap suatu perkara	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, JAM-INTEL

No	Layanan	Deskripsi Layanan	Unit Kerja
2.	Layanan Tilang	Layanan yang diberikan kepada stakeholder dan pengguna layanan terkait penindakan pelanggaran lalu lintas pada tahap pembayaran denda dan pengambilan barang bukti tilang	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
3.	Layanan Pengelolaan Barang Bukti	Layanan yang berikan kepada pengguna layanan terkait pengembalian barang bukti suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dikembalikan kepada yang berhak maupun pemusnahan barang bukti yang diputuskan untuk dimusnahkan	Jaksa Agung Muda Pembinaan
4	Layanan Pemulihan Aset	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait dengan pemulihan aset dari suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.	Pusat Pemulihan Aset
5	Layanan Pengawasan Orang Asing	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait dengan kegiatan pengawasan orang asing	Jaksa Agung Muda Intelijen
6	Layanan Pengawasan Aliran Kepercayaan	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait dengan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan	Jaksa Agung Muda Intelijen
7	Layanan Pencarian Orang	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait dengan kegiatan pencarian orang terkait penegakan hukum	Jaksa Agung Muda Intelijen
8	Layanan Penerangan Hukum	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait dengan kegiatan pencarian orang terkait penerangan hukum	Jaksa Agung Muda Intelijen
9	Layanan Penyuluhan Hukum	Layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum	Jaksa Agung Muda Intelijen
10	Layanan Bantuan Hukum	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait pemberian bantuan hukum kepada mas	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
11	Layanan Pertimbangan Hukum	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait pemberian pertimbangan hukum kepada instansi / lembaga pemerintah	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
12	Layanan Konsultasi Hukum Gratis	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait pemberian pendampingan hukum kepada instansi / lembaga pemerintah	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
13	Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai sarana untuk melaporkan dugaan-dugaan korupsi maupun pelanggaran lainnya	Jaksa Agung Muda Intelijen
14	Layanan Besuk Tahanan	Layanan yang diberikan kepada stakeholder terkait untuk memperoleh ijin besuk tahanan kejaksaan republik indonesia	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Intelijen
15	Layanan Kesehatan	Layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh penanganan dan informasi Kesehatan di fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat Kesehatan Yustisial
16	Layanan Pelaporan Aliran	Layanan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat melaporkan	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

No	Layanan	Deskripsi Layanan	Unit Kerja
	Kepercayaan Masyarakat	pengaduan aliran agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan sekitar.	
17	Layanan Antar Jemput Saksi Anak/Difabel	Layanan yang diberikan kepada masyarakat khusus saksi anak atau difabel agar mempermudah dalam proses persidangan dan penanganan perkara	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Intelijen
18	Layanan Pengamanan Pembangunan Strategis	Layanan yang dapat digunakan masyarakat atau stakeholder tertentu dalam hal pengamanan pembangunan strategis	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
19	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan yang diberikan kepada pegawai terkait dengan pelatihan dan pendidikan pegawai untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
20	Layanan Perpustakaan	Layanan yang diberikan kepada pegawai maupun masyarakat terkait dengan kebutuhan literasi melalui fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
21	Layanan Kepegawaian	Layanan yang diberikan kepada pegawai terkait dengan informasi hak dan kewajiban kepegawaian yang bersangkutan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
	Layanan Perencanaan dan Pengadaan ASN	Merencanakan plotting sebaran pengadaan ASN dan melakukan perekrutan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
22	Layanan Pengelolaan Keuangan	Memberikan dukungan dalam perbendaharaan, pelayanan pembayaran, pengelolaan KAS, perpajakan, pengujian dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
23	Layanan Perencanaan kinerja yang selaras dengan penganggaran	Memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKP, dan RKA Kejaksaan RI untuk manajemen kinerja	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
24	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Menginventarisasi kebutuhan barang dan jasa secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan data BMN	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
25	Layanan Pengelolaan Rumah Tangga	Mengelola Sarana dan Prasarana berupa kebersihan kantor, sanitasi lingkungan, keamanan, akomodasi, dan konsumsi	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
26	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Mengelola asset kantor yang berwujud ataupun tidak berwujud mulai dari penerimaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan dan pelaporan asset barang milik negara.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
27	Layanan Perpustakaan Digital Eksternal	Mengelola system perpustakaan, meliputi bahan-bahan pustaka baik bersifat elektronik maupun <i>hard copy</i> melalui <i>clustering</i> dan katalogisasi untuk kebutuhan eksternal.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
28	Layanan Pendukung Keputusan Perumusan Kebijakan	Melakukan kajian dan merekomendasikan kebijakan Penegakan Hukum	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum

No	Layanan	Deskripsi Layanan	Unit Kerja
	Penegakan Hukum		
29	Layanan Evaluasi Kinerja dan Anggaran	Memberikan pemantauan evaluasi kinerja dan anggaran yang menjadi umpan balik bagi rumusan penetapan kinerja selanjutnya	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
30	Layanan Transportasi	Memberikan dukungan transportasi untuk pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
31	Layanan Perlengkapan	Memberikan dukungan transportasi untuk pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
32	Layanan Pengamanan	Memberikan dukungan pengamanan terhadap seluruh elemen penegakan hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
33	Layanan Persandian	Memberikan dukungan terkait hasil produksi intelijen	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
34	Layanan Statistik Kriminal	Memberikan dukungan informasi statistik kinerja penegakan hukum.	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
35	Layanan Tata Kelola TIK	Memberikan dukungan teknologi informasi kepada Lembaga dalam menjalankan administrasi terkait tugas dan fungsi.	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

Tabel 3.2. Daftar Layanan Kejaksaan Republik Indonesia

### C. Arsitektur Target Layanan SPBE

Arsitektur target layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia merupakan rencana arsitektur yang memenuhi kondisi ideal dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan berdasarkan proses bisnis ideal yang telah dijelaskan sebelumnya. Arsitektur target layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Arsitektur Target Layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
<b>Layanan Utama</b>												
KJSL-04	Pengelolaan Intelijen	Mendukung tugas Kejaksaan dalam melaksanakan operasi intelijen yustisial	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	KemenkumHAM, BIN, POLRI, KPK, BSSN	Instansi, Masyarakat	Government to Government	KJSB-04	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	
KJSL-04.01	Penyelidikan	Menindaklanjuti informasi intelijen maupun laporan pengaduan	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	KemenkumHAM	Instansi, Masyarakat	Government to Government	KJSB-04.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.01 Penyelidikan
KJSL-04.02	Pengamanan	Menindaklanjuti informasi intelijen maupun laporan pengaduan	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	KemenkumHAM, BIN, POLRI	Instansi, Masyarakat	Government to Government	KJSE-04.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.02 Pengamanan Pembangunan Strategis
KJSL-04.03	Penggalangan	Mendukung tugas intelijen dalam melakukan penggalangan untuk penegakan hukum	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	KemenkumHAM, BIN, POLRI	Instansi, Masyarakat	Government to Government	KJSE-04.03	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.03 Penggalangan
KJSL-04.04	Pengawasan Multimedia	Mendukung tugas intelijen sesuai UU Kejaksaan No.11 Tahun 2021	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	BSSN, Kemenkominf o	Instansi,	Government to Citizen	KJSB-04.04	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.04 Pengawasan Multimedia
KJSL-04.05	Pengamanan Pembangunan Strategis	Mendukung program pemerintah dalam	Melaksanakan tugas intelijen	JAM-INTEL	KemenkumHAM, BIN, POLRI, KPK	Instansi,	Government to Government	KJSB-04.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.05

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
		melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional	penegakan hukum									Pengamanan Pembangunan Strategis
KJSL-04.06	Layanan Persandian	Mendukung tugas intelijen dalam bidang persandian dan keamanan informasi	Melaksanakan tugas intelijen penegakan hukum	JAM-INTEL	Kemenkum HAM, BSSN, BIN	Instansi	Government to Government	KJSB-04.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.04 Pengelolaan Intelijen	RAL-01.28.04.06 Layanan Persandian
KJSL-05	Pengelolaan Tindak Pidana	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	Kemenkum HAM, BIN, POLRI, KPK, TNI	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	
KJSL-05.01	Pra Penuntutan	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	Kemenkum HAM, BIN, POLRI, KPK, TNI	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.01 Pra Penuntutan
KJSL-05.02	Penyidikan	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	Kemenkum HAM, BIN, POLRI, KPK, TNI	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSE-05.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.02 Penyidikan
KJSL-05.03	Penuntutan	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL	Kemenkum HAM, BIN, MA, POLRI, TNI	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.03	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.03 Penuntutan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
KJSL-05.04	Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL, P-PA	KemenkumHAM, BIN, POLRI, KPK, TNI	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.04	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.04 Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi
KJSL-05.05	Penanganan Perkara Tilang	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM	KemenkumHAM, MA, POLRI,	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.05	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.05 Penanganan Perkara Tilang
KJSL-05.06	Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-PIDUM, JAM-PIDSUS, JAM-PIDMIL,	KemenkumHAM, MA, POLRI, KPK	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.06	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.06 Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi
KJSL-05.07	Layanan Pengembalian Barang Bukti	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-BIN	KemenkumHAM, MA	Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.07	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.06 Layanan Pengembalian Barang Bukti
KJSL-05.08	Layanan Pemeliharaan Barang Bukti	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-BIN		Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-05.08	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.06 Layanan Pemeliharaan Barang Bukti
KJSL-05.09	Layanan Pemusnahan Barang Bukti	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-BIN	MA, POLRI, KemenkumHAM	Instansi,	Government to Government,	KJSB-05.09	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.05 Pengelolaan Tindak Pidana	RAL-01.28.05.06 Layanan Pemusnahan Barang Bukti

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
		penanganan perkara					Government to Citizen					
KJSL-06	Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-DATUN	KemenkumHAM, MA, Instansi Pemerintah	Instansi	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-06	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	
KJSL-06.01	Penegakan Hukum	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-DATUN	KemenkumHAM, MA, Instansi Pemerintah	Instansi	Government to Government	KJSB-06.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAL-01.28.06.01 Penegakan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
KJSL-06.02	Bantuan Hukum	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-DATUN	KemenkumHAM, MA, Instansi Pemerintah	Instansi	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-06.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAL-01.28.06.02 Bantuan Hukum
KJSL-06.03	Pelayanan Hukum	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-DATUN	KemenkumHAM, MA, Instansi Pemerintah, Masyarakat	Instansi, Masyarakat	Government to Citizen	KJSB-06.03	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAL-01.28.06.03 Konsultasi Hukum Gratis
KJSL-06.04	Pertimbangan Hukum	Melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Tata Usaha Negara	Melaksanakan tugas penegakan hukum	JAM-DATUN	Instansi Pemerintah	Instansi	Government to Government	KJSB-06.04	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	RAL-01.28.06.04 Pertimbangan Hukum
KJSL-06.05	Tindakan Hukum Lain	Melaksanakan tugas dan fungsi	Melaksanakan tugas	JAM-DATUN	KemenkumHAM, MA, Instansi	Instansi	Government to	KJSB-06.05	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.06 Pengelolaan Perkara Perdata	RAL-01.28.06.05

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
		Kejaksanaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	penegakan hukum		Pemerintah, Masyarakat		Government				dan Tata Usaha Negara	Tindakan Hukum Lain
KJSL-07	Pemulihan Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset dan keuangan negara	P-PA	Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-07	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	
KJSL-07.01	Penelusuran Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Menelusuri aset negara untuk dipulihkan	P-PA	BIN, Kemenkeu, PPKATK	Instansi	Government to Government	KJSB-07.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.01 Penelusuran Aset
KJSL-07.02	Pengamanan Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Mengamankan aset negara hasil penelusuran	P-PA	-	Instansi	Government to Government	KJSB-07.02	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.02 Pengamanan Aset
KJSL-07.03	Pemeliharaan Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Memelihara aset untuk menjaga nilai ekonominya	P-PA	-	Instansi	Government to Government	KJSB-07.03	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.03 Pemeliharaan Aset
KJSL-07.04	Perampasan Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Menyelamatkan potensi kerugian negara	P-PA	-	Instansi	Government to Government	KJSB-07.04	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.04 Perampasan Aset
KJSL-07.05	Pengembalian Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Menyelamatkan potensi kerugian negara	P-PA	Kemenkeu, KPKNL	Instansi	Government to Government,	KJSB-07.05	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.05 Pengembalian Aset

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
KJSL-07.06	Pemusnahan/Penghapusan Aset	Melaksanakan tugas pemulihan aset	Menghapus aset yang menjadi beban negara	P-PA	Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-07.06	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum	RAL-01.28.07 Pemulihan Aset	RAL-01.28.07.06 Pemusnahan / Penghapusan Aset
<b>Layanan Pendukung</b>												
KJSL-01	Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama			JAM-BIN	KemenkumHAM, Kemenlu, Kemendagri	Instansi	Government to Government	KJSB-01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.01 Dalam Negeri		
KJSL-01.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan			JAM-BIN	KemenkumHAM	Instansi	Government to Government	KJSB-01.01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.05 Kesekretariat an Negara		
KJSL-01.02	Pengelolaan Naskah Dinas Pengaturan lainnya			JAM-BIN	KemenkumHAM	Instansi	Government to Government	KJSB-01.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.05 Kesekretariat an Negara		
KJSL-01.03	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri			JAM-BIN	Kemendagri, Instansi Pemerintah	Instansi	Government to Government, Government to Business	KJSB-01.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.01 Dalam Negeri		
KJSL-01.04	Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri			JAM-BIN	Kemenlu, KemenkumHAM	Instansi	Government to Government	KJSB-01.04	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.01 Dalam Negeri		
KJSL-02	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			P-DAS	Bappenas, BRIN, BSSN	Instansi	Government to Government	KJSB-02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-01.43 Informasi		
KJSL-02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kejaksaan			P-DAS	Bappenas	Instansi	Government to Government	KJSB-02.01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-01.43 Informasi		
KJSL-02.02	Pengelolaan Infrastruktur TIK			P-DAS	BRIN	Instansi	Government to Government	KJSB-02.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-01.43 Informasi		

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
KJSL-02.03	Pengelolaan Keamanan Informasi			P-DAS	BSSN	Instansi	Government to Government	KJSB-02.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-01.43 Informasi		
KJSL-02.04	Pengelolaan, Analisis Data dan Statistik			P-DAS	BPS	Instansi	Government to Government	KJSB-02.04	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-01.43 Informasi		
KJSL-02.05	Perpustakaan			P-DAS	Perpusnas	Instansi, Pegawai, Masyarakat	Government to Citizen	KJSB-02.05	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
KJSL-02.06	Pelayanan Informasi Publik	Penyebaran informasi Publik	Menyebarkan/ Mengolah Informasi yang bersifat Publik dan disebarkan secara masif	P-PEN, P-DAS	KemenkumHAM	Pegawai, Instansi, Masyarakat	Government to Citizen	KJSB-02.06	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.28 Hukum		
KJSL-02.07	Pengelolaan Media dan Kehumasan	Mengelola Media dan Kehumasan terkait kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia	Publikasi kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia	P-PEN, P-DAS	Instansi Pemerintah, Media	Pegawai, Instansi, Masyarakat	Government to Citizen	KJSB-02.07	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.43 Informasi		
KJSL-02.08	Penerangan Hukum	Sosialisasi produk hukum secara insidental berdasarkan Trend	Memberikan penjelasan terkait kejadian atau perubahan pada sistem hukum positif di Indonesia	P-PEN	Instansi Pemerintah	Pegawai, Instansi, Masyarakat	Government to Government	KJSB-02.08	RAL-01 Layanan Publik	RAL-02.02		

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
KJSL-02.09	Penyuluhan Hukum	Sosialisasi produk hukum secara kontinuitas yang mengandung unsur pendidikan	Menimbulkan perubahan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup	P-PEN	Instansi Pemerintah, Masyarakat	Pegawai, Instansi, Masyarakat	Government to Citizen	KJSB-02.09	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.31		
KJSL-03	Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			P-STJ	BRIN	Instansi	Government to Government	KJSB-03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.03		
KJSL-03.01	Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan			P-STJ	BRIN	Instansi	Government to Government	KJSB-03.01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.03		
KJSL-03.02	Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan			P-STJ, BRIN	BRIN	Instansi	Government to Government	KJSB-03.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.03		
<b>Layanan Sumber Daya</b>												
KJSL-08	Pengelolaan SDM			JAM-BIN	Kemenpan RB	Instansi, Pegawai	Government to Employee	KJSB-08	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-08.01	Perencanaan dan Pengadaan SDM			JAM-BIN	Kemenpan RB	Instansi	Government to Government	KJSE-08.01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-08.02	Pengembangan SDM			JAM-BIN	Kemenpan RB	Pegawai	Government to Employee	KJSE-08.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-08.03	Pengelolaan Diklat			JAM-BIN	Kemenristek Dikti, LAN	Pegawai	Government to Employee	KJSE-08.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-08.04	Pengelolaan Kinerja Pegawai			JAM-BIN	BKN, Kemenpan RB	Pegawai	Employee to Government	KJSB-08.04	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		

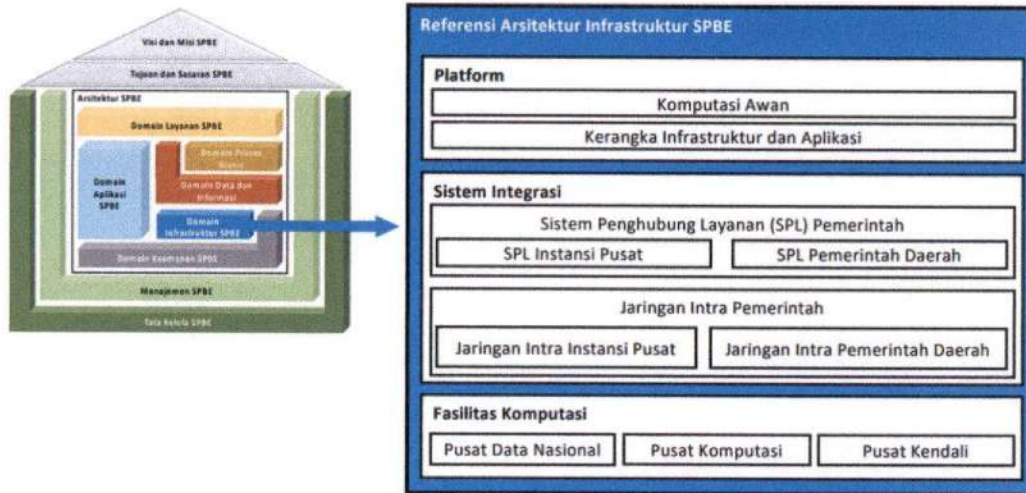
ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
KJSL-08.05	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai			JAM-BIN	BKN	Pegawai	Government to Employee	KJSB-08.05	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-08.06	Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal			JAM-BIN	Kemenkum HAM	Instansi	Government to Employee	KJSB-08.06	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-09	Pengelolaan Keuangan dan Sarpras			JAM-BIN	Kemenkeu, Bappenas	Instansi	Government to Government	KJSB-09	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.06 Dukungan Operasional Organisasi		
KJSL-09.01	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran			JAM-BIN	Kemenkeu, Bappenas	Instansi	Government to Government	KJSB-09.01	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional		
KJSL-09.02	Pelaksanaan Anggaran			JAM-BIN	Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-09.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.02 Keuangan		
KJSL-09.03	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara			JAM-BIN	Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-09.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.02 Keuangan		
KJSL-09.04	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi			JAM-BIN	Bappenas, Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-09.04	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.08 Organisasi dan Tata Kelola		
KJSL-09.05	Pengadaan Barang dan Jasa			JAM-BIN	Kemenkeu, LKPP	Instansi	Government to Government	KJSB-09.05	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.02 Keuangan		
KJSL-09.06	Pengelolaan Barang Milik Negara			JAM-BIN	Kemenkeu	Instansi	Government to Government	KJSB-09.06	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.06 Dukungan Operasional Organisasi		
KJSL-10	Pengelolaan Organisasi			JAM-BIN	Kemenpan-RB, Bappenas	Instansi	Government to Government	KJSB-10	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.08 Organisasi dan Tata Kelola		
KJSL-10.01	Penataan Lembaga dan			JAM-BIN	Kemenpan RB,	Instansi	Government to	KJSB-10.01	RAL-02	RAL-02.08		

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	ID Stakeholder Eksternal	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)
	Ketatalaksanaan						Government		Layanan Administrasi Pemerintahan	Organisasi dan Tata Kelola		
KJSL-10.02	Pengelolaan Reformasi Birokrasi			JAM-BIN	Kemenpan-RB	Instansi, Pegawai	Government to Government	KJSB-10.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.04 Aparatur Negara		
KJSL-10.03	Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan			JAM-BIN	Kemensetneg	Instansi	Government to Government	KJSB-10.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.08 Organisasi dan Tata Kelola		
KJSL-11	Pengelolaan Pengawasan			JAM-WAS	Kemenpan-RB	Instansi, Pegawai	Government to Employee	KJSB-11	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.06		
KJSL-11.01	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal			JAM-WAS	Kemenpan-RB	Instansi, Pegawai	Government to Employee	KJSB-11.02	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.06		
KJSL-11.02	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			JAM-WAS	Kemenpan-RB	Instansi, Pegawai	Government to Employee	KJSB-11.03	RAL-02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL-02.06		
KJSL-12	Pengelolaan Kesehatan Yustisia			P-KY	Kemenkes, Kemenkum HAM	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-12	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.32		
KJSL-12.01	Pengelolaan Kesehatan Umum			P-KY	Kemenkes, Kemenkum HAM	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-12.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.32		
KJSL-12.02	Pengelolaan Kesehatan Yustisia			P-KY	Kemenkes, Kemenkum HAM	Instansi, Masyarakat	Government to Government, Government to Citizen	KJSB-12.01	RAL-01 Layanan Publik	RAL-01.32		

## BAB IV ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Struktur arsitektur infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penjabaran turunan dari struktur arsitektur infrastruktur SPBE Nasional. Referensi arsitektur infrastruktur SPBE Nasional yang dimaksud, dapat dilihat pada gambar 4.1.



**Gambar 4.1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional**

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas tiga(3) komponen, yaitu: Platform, Sistem Integrasi, dan Fasilitas Komputasi. Adapun Referensi arsitektur infrastruktur SPBE Nasional yang digunakan pada arsitektur infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan system komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoprasian dari sebuah lingkungan sistem
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu system / organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dan pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

### B. Arsitektur Infrastruktur SPBE Eksisting

Infrastruktur SPBE di Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi Arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Penerapan ketiga entitas metadata dilakukan dengan dekomposisi atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada gambar 4.2.



**Gambar 4.2. Dekomposisi Entitas metadata arsitektur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Kejaksaan Republik Indonesia.

Kondisi infrastruktur di Kejaksaan Republik Indonesia memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang disediakan komputasi awan dimana penyimpanan pada layanan komputasi awan telah tersedia secara virtual. Kejaksaan Republik Indonesia telah menggunakan layanan komputasi awan tipe Software as a Service (SaaS) dengan status kepemilikan sendiri yang dikelola Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Dalam sistem integrasi, Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Kejaksaan Republik Indonesia (LAN, WAN, internet, dan intranet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi. Jaringan ini dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (Network Operation Center/ Noq pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh IPPD. Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

telah berjalan dimana berbagai layanan dapat di akses secara daring melalui aplikasi yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait. Konektivitas pada Kejaksaan Republik Indonesia (LAN, WAN, internet, dan intranet), terdapat bandwidth yang cukup besar (300 Mb Internasional, 1 Gb Nasional) yang digunakan dalam mendukung kelancaran terhadap akses layanan yang ada dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang menerapkan Virtual Private Network (VPN) untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Fasilitas komputasi di Kejaksaan Republik Indonesia belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat layanan big data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Kondisi infrastruktur TI di Kejaksaan Republik Indonesia saat ini dipetakan pada komponen umum infrastruktur TI seperti dapat dilihat pada Gambar 4.3.



**Gambar 4.3. Pemetaan Komponen Umum Infrastruktur TI di Kejaksaan Republik Indonesia**

### C. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI terdiri dari Fasilitas Komputasi, Sistem Penghubung Layanan, Jaringan Intra Pemerintah, Komputasi Awan, Perangkat Lunak Platform, Perangkat Media Penyimpanan, Perangkat Keras Server, Perangkat Jaringan, Perangkat Keamanan.

Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI dapat dilihat pada tabel 4.4 sampai dengan tabel 4.12.

**Tabel 4.4 Arsitektur Infrastruktur Fasilitas Komputasi**

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Kode Model Referensi Fasilitas	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier	Sistem/Tipe Pengamanan	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id. Metadata Terkait (Dependency)
KJSI-01.01.01	Pusat Data Nasional Kominfo		5 Mbps		Kominfo	Instansi Pemerintah Lain	Kominfo	P-DAS	Tier 2	Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data Nasional	KOMINFO	KJSL-KJSA-
KJSI-01.02.01	Data Center Kejaksaan LT 8 GD Daskrimti		40 Mbps		Lantai 8 Gedung Pusat Daskrimti	Sendiri	Kejaksaan	P-DAS	Tier 2	Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi		KJSL-KJSA-
KJSI-01.02.02	Data Center Kejaksaan LT B GD Daskrimti				Lantai Semi Basement Gedung Pusat Daskrimti	Sendiri	Kejaksaan	P-DAS	Tier 2	Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi		KJSL-KJSA-
KJSI-01.02.03	Data Recovery Center Kejaksaan		1 Gbps		Gedung AMC Ceger Jakarta	Sendiri	Kejaksaan	P-DAS	Tier 3	Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi		KJSL-KJSA-

**Tabel 4.5 Arsitektur Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan**

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id. Metadata Terkait (Dependency)
KJSI-02.02.01	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Pertukaran data perkara pidana antar LPH	Instansi Pemerintah Lain	Kemenko POLHUKAM	IGSN (Intra Government Secured Network) Kantor Staf Presiden	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Polri, Kejaksaan, MA, Ditjenpas, Kominfo, BSSN, Kantor Staf Presiden, BAPPENAS, KPK, BNN, dan POLHUKAM	KJSL-KJSA-
KJSI-02.02.02	Interoperabilitas dengan DJA	Penghubung layanan keuangan pada DJA dengan Keuangan Kejaksaan untuk E-Tilang	Instansi Pemerintah Lain	Kemenkeu	IGSN simponi Kementrian Keuangan	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kementrian Keuangan	KJSL-KJSA-

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSI-02.02.03	Interoperabilitas DJP	Penghubung aplikasi CMS PIDSUS dengan aplikasi PPNS DJP	Instansi Pemerintah Lain	Kemenkeu	IGSN simponi Kementerian Keuangan	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kementerian Keuangan	KJSL-KJSA-
KJSI-02.02.04	Interoperabilitas DJPB	Penghubung terkait penganggaran	Instansi Pemerintah Lain	Kemenkeu	IGSN simponi Kementerian Keuangan	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kementerian Keuangan	KJSL-KJSA-

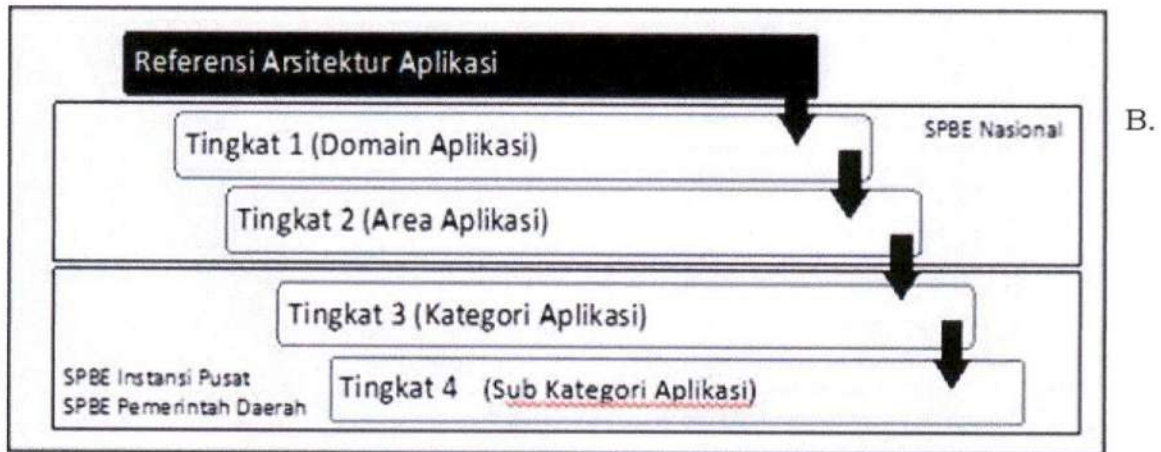
**Tabel 4.6 Arsitektur Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah**

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSI-02.01.01	Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan	Jaringan Intra yang menghubungkan seluruh satuan kerja Kejaksaan		Sendiri	Kejaksaan	P-DAS	<p>a. Satker Kejangung, layanan VPN dengan KJSI bandwidth sebesar 250 Mbps.</p> <p>b. Satker badiklat, layanan VPN dengan bandwidth sebesar 3 Mbps.</p> <p>c. Data Recovery Center (serpong), layanan VPN dengan bandwidth sebesar 50 Mbps.</p> <p>d. 33 Satker Kejati, layanan VPN dengan KJSI bandwidth sebesar 3 Mbps.</p> <p>e. 438 Satker Kejari, layanan VPN dengan media akses kabel FO sebanyak 411 lokasi, dan media akses Vsat 27 lokasi dengan bandwidth sebesar 1 Mbps.</p> <p>f. 63 Satker Cabjari, layanan VPN dengan media akses kabel FO sebanyak 18 lokasi, dan media akses Vsat 45 lokasi dengan media akses kabel FO</p>	Fiber Optic	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra Pemerinta		KJSL-KJSA-

## BAB V ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

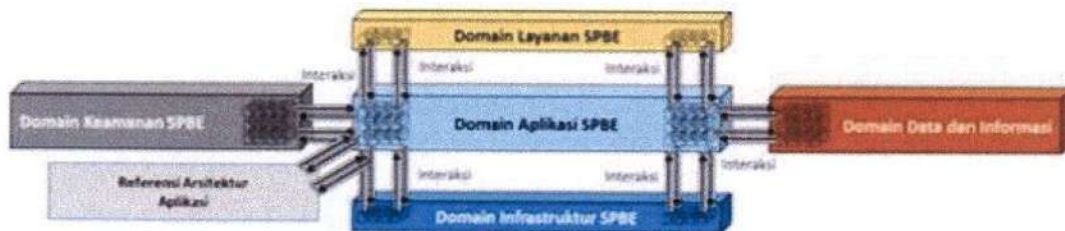
### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) merupakan kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi instansi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Referensi Arsitektur Aplikasi juga digunakan untuk mengelompokkan dan memetakan aplikasi SPBE yang dimiliki untuk menggambarkan potensi kolaborasi (berbagi pakai) aplikasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu dalam penyelenggaraan SPBE. Struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE Nasional dapat dilihat pada gambar 5.1.



**Gambar 5.1. Struktur Referensi Aplikasi SPBE**

Penyusunan referensi arsitektur Aplikasi SPBE dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antar domain. Keterkaitan antar domain pada arsitektur aplikasi SPBE Nasional dapat dilihat pada gambar 6.5.



**Gambar 5.2. Keterkaitan antar Domain Aplikasi SPBE Nasional**

Referensi arsitektur SPBE Nasional yang digunakan dalam penyusunan arsitektur aplikasi SPBE Kejaksaan RI ditunjukkan pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Referensi Arsitektur SPBE Nasional**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain,

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Tabel 5.1 menjelaskan bahwa dalam menyusun arsitektur aplikasi, Kejaksaan RI mengacu kepada 4(empat) referensi arsitektur aplikasi SPBE Nasional yang dibagi menjadi 2(dua) jenis aplikasi yakni aplikasi umum dan aplikasi khusus.

**B. Arsitektur Aplikasi SPBE Kejaksaan RI**

Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI ditunjukkan pada tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Arsitektur Aplikasi SPBE Kejaksaan RI**

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-01.01.01	JDIH	Pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkeinambungan	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Web Based	PHP	YII	Mysql	P-DAS	JAM-BIN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik		
KJSA-01.01.02	E-Tilang	Sistem Layanan Pembayaran Denda Tilang Secara Online melalui Perbankan dan Merchant Pembayaran yang terdaftar	Pembayaran denda tilang secara online	Pembayaran Denda Tilang	Web Based	PHP	CI	Postgre	P-DAS	P-DAS Biro Keuangan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembangan (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-01.01.03	Halo JPN	Layanan Konsultasi Hukum Gratis bagi masyarakat berbasis website dilayani oleh seluruh JPN se Indonesia	Memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan konsultasi hukum Gratis bagi masyarakat	Konsultasi Hukum Online	Web Based	PHP			JAM-DATUN	JAM-DATUN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik		
KJSA-01.02.01	LPSE-KEJAKSAAN	Layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa							Kementerian Keuangan	JAM-BIN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Kementerian Keuangan	
KJSA-01.02.02	SP4N-LAPOR!	Aplikasi Nasional Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Rakyat							PAN-RB	JAM-INTEL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PAN-RB	

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-01.02.03	KRISNA	Layanan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran							Bappenas	JAM-BIN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bappenas	
KJSA-01.02.04	SAKTI	Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran							Kementerian Keuangan	JAM-BIN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Kementerian Keuangan	

KJSA-01.02.05	E-MONEV	Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja-K/L).	Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.						Bappenas	JAM-BIN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bappenas	
KJSA-02.01.01	CMS PIDUM	Pengadministrasian data perkara Tindak Pidana Umum	Pengelolaan Data Perkara Tindak Pidana Umum	Dokumen data perkara tindak pidana umum	Web Based	PHP	Laravel	Postgre	P-DAS	JAM-PIDUM	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi):	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-02.01.02	CMS PIDSUS	Pengadministrasian data perkara Tindak Pidana Khusus	Pengelolaan Data Perkara Tindak Pidana Khusus	Dokumen data perkara tindak pidana khusus	Web Based	PHP	Laravel	Postgre	P-DAS	JAM-PIDSUS	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu		
KJSA-02.01.03	CMS DATUN	Pengadministrasian data perkara Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara	Pengelolaan Data Perkara Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara	Dokumen data perkara tindak pidana perdata dan tata usaha negara	Web Based	PHP	Laravel	Postgre	P-DAS	JAM-DATUN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu		
KJSA-02.02.01	LMS	Sistem Manajemen yang digunakan untuk membuat materi dan konten berbasis web	Sistem Manajemen Pembelajaran yang menyediakan konten terkait tata cara penggunaan aplikasi	Manual Book dan Video pembelajaran	Web Based	PHP	Laravel	Postgre	P-DAS	Seluruh Bidang	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.02	SPEDE	Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik	Memudahkan dan mempercepat proses Persuratan dan Disposisi secara Elektronik	Surat dan Disposisi	Web Based	PHP	Laravel	Postgre	P-DAS	Seluruh Bidang	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-02.02.03	SIMKARI KEPEGAWAIAN	Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia	Pengelolaan dan Manajemen Kepegawaian Kejaksaan RI	Data Kepegawaian	Web Based	PHP	Symfony	Oracle	P-DAS	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.04	MY SIMKARI	Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia	Pengelolaan dan Manajemen Kepegawaian Kejaksaan khususnya terkait kinerja Pegawai	Data Kepegawaian	Web Based	PHP	Laravel	Mariadb	JAM-BIN	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.05	PTSP	Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan data pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan		Web Based	PHP	Laravel		JAM-BIN	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.05	BUKU TAMU	Aplikasi Pendataan data Tamu	Pengelolaan data tamu pada Kejaksaan		Web Based	PHP	Laravel		JAM-BIN	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.06	SILABIN	Aplikasi Laporan Bulanan	Aplikasi Laporan Bulanan pada bidang Pembinaan	Laporan Bulanan bidang Pembinaan	Web Based	PHP	CI		P-DAS	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-02.02.07	KEJAKSAAN MOBILE	Media pendukung kinerja pegawai dimana di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas untuk meningkatkan produktifitas kinerja harian seperti absensi online dan report tugas harian	Aplikasi untuk kegiatan absensi online dan report tugas harian	Data absensi Pegawai dan lampiran rekap absensi	- Mobile - Web Based	PHP, Java, Swift	Laravel, Java, Swift	Mysql	P-DAS	Seluruh Bidang	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.08	MAIL KEJAKSAAN	Aplikasi Layanan Email Kedinasan	Aplikasi penggunaan layanan Email Kedinasan Kejaksaan		Web Based				P-DAS	P-DAS	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.09	ARSSYS	Aplikasi Pemulihan Asset	Aplikasi pengelolaan data pemulihan asset	Data Pemulihan Asset	Web Based	PHP			P-DAS	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembangan (Dependency)	Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	RAA Level 1 (Dependency)	RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-02.02.10	SADAP	Sistem Satu Data Pengawasan	Aplikasi pelaporan hasil inspeksi pada bidang Pengawasan	Data pengelolaan laporan pengawasan	Web Based	PHP			JAM-WAS	JAM-WAS	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.11	SIACC		Portal berita intelijen untuk Pimpinan dan seluruh satuan kerja		Web Based				JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.12	INDERASEMBILAN		Aplikasi pelaporan intelijen harian, register intelijen, laporan khusus, laporan bulanan, dan administrasi intelijen		Web Based				JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.13	VICA		Aplikasi video confrence						JAM-INTEL	JAM-INTEL	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi utama dalam aplikasi)	Luaran (Merupakan hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki dan digunakan)	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	← Unit Pengembang (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi/Pengguna (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSA-02.02.14	Sicana	Sistem Informasi Perencanaan	Sistem perencanaan seluruh satker Kejaksaan RI sebelum di Pool Data ke Sistem Kemenkeu	Data Perencanaan Program, Anggaran	Web	PHP	Laravel	MySQL	JAM-BIN	JAM-BIN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.15	Mail Kejaksaan	Sistem Surat Elektronik Internal Kejaksaan	Persuratan Elektronik Kedinasan	Data Surat Elektronik Kedinasan	Web	PHP	Zimbra	PostgreSQL	P-DAS	P-DAS	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		
KJSA-02.02.16	Website Kejaksaan RI	Sistem Informasi Publikasi Kejaksaan RI	Media Informasi	Informasi Kejaksaan	Web	PHP	C-Panel, WHM	MySQL	P-DAS	P-DAS	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Fungsi Tertentu		

## BAB VI ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional. Domain arsitektur keamanan SPBE digunakan untuk pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta kebijakan keamanan yang komprehensif. Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non- repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

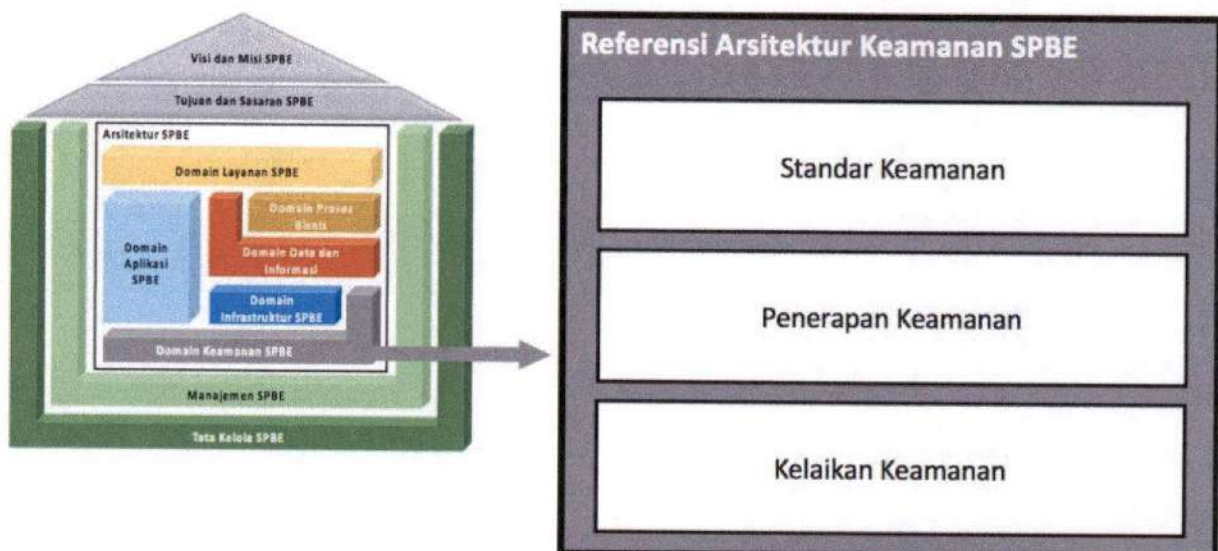
Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak independen yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE Nasional dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. domain keamanan; dan
2. area keamanan.

Struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat terlihat pada gambar 6.1 berikut:



**Gambar 6.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Kejaksaan RI**

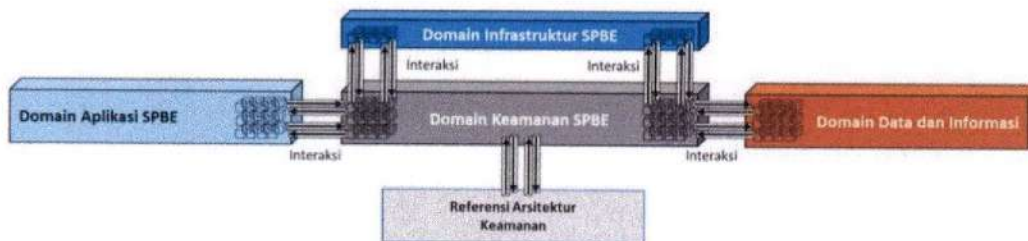
Referensi arsitektur keamanan SPBE Kejaksaan mengacu kepada referensi arsitektur keamanan SPBE Nasional. Referensi arsitektur keamanan SPBE Nasional yang digunakan oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Kejaksaan RI**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

### B. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Aplikasi SPBE, dan domain arsitektur. Infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada Gambar 6.2.



**Gambar 6.2. Hubungan antar Domain Keamanan SPBE Kejaksaan RI**

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.

### C. Arsitektur Keamanan SPBE

Arsitektur Keamanan SPBE terdiri dari Standar Prosedur Keamanan SPBE, Edukasi Kesadaran Keamanan, Identifikasi Kerentanan Keamanan, Peningkatan Keamanan, Penanganan Insiden Keamanan, Audit Keamanan, Kelaikan Keamanan.

Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI dapat dilihat pada tabel 6.2 sampai dengan tabel 6.8.

1. Standar Prosedur Keamanan SPBE

Daftar Standar Prosedur Keamanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Daftar Standar Prosedur Keamanan SPBE**

ID	Nama
KJSK-01.01.01	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021
KJSK-01.01.02	Kepja SMKI
KJSK-01.01.03	SK Tim CSIRT

2. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Daftar kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE dilihat pada Tabel 6.3.

**Tabel 6.3. Daftar Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE**

ID	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan
KJSK-02.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Open Web Application Security Project (OWASP) Batch 1	Pendidikan dan Pelatihan Open Web Application Security Project (OWASP) Batch 1 adalah pelatihan dasar mencari vulnerable pada aplikasi khususnya yang berbasis web	25-28 Okt 2021
KJSK-02.01.02	EC-Council: Computer Forensic Fundamental	EC-Council: Computer Forensic Fundamental adalah pendidikan dan pelatihan terkait dasar-dasar forensik dan anti forensik dalam sistem komputerisasi	18-20 Nov 2021
KJSK-02.01.03	EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) adalah pelatihan terkait tata cara investigasi forensik digital dalam dunia siber.	22-26 Nov 2021
KJSK-02.01.04	EC-Council: Certified Ethical Hacker (CEH)	EC-Council: Certified Ethical Hacker (CEH) adalah pendidikan dan pelatihan menjadi Etikal Hacker khususnya di instansi Pemerintahan.	31 Mei - 7 Juni 2022

3. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE

Daftar kegiatan identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilihat pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4. Daftar Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE**

ID	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSK-02.01.01	Pentest Email Kedinasan	Pentest Email Kedinasan adalah sebuah upaya simulasi dan pencegahan dini terkait celah keamanan yang mungkin ada pada server email dinas Kejaksaan	9 Nov 2022	

4. Peningkatan Keamanan SPBE

Daftar kegiatan peningkatan keamanan SPBE dilihat pada tabel 6.5.

**Tabel 6.5. Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE**

ID	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Id Metadata Terkait (Dependency)

5. Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan

Daftar kegiatan peningkatan keamanan SPBE dilihat pada tabel 6.6.

**Tabel 6.6. Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan**

ID	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Id Metadata Terkait (Dependency)
KJSK-02.04.01	Slot Gacor Threat Hunt	Slot Gacor Threat Hunt adalah sebuah giat mencari dan menonaktifkan shell/backdoor slot gacor yang telah ditanam pada sebagian web server pemerintahan salah satunya Kejaksaan RI		

6. Audit Keamanan SPBE

Daftar Kegiatan Audit Keamanan SPBE dilihat pada Tabel 6.7.

**Tabel 6.7. Kegiatan Audit Keamanan**

ID	Nama Kegiatan	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan	Tindak Lanjut
KJSK-03.01.01	Cyber Security Maturity Kejaksaan Agung	Tingkat Kematangan: Level 3	Kematangan Keamanan Siber Organisasi	23-Nov-22	

7. Kelaikan Keamanan SPBE

Daftar Kelaikan Keamanan SPBE dilihat pada Tabel 6.8.

**Tabel 6.8. Kelaikan Keamanan SPBE**

ID	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Aplikasi (Dependency)	Data dan Informasi (Dependency)
-	-	-	-	-	-

## BAB VII

### ANALISIS KESENJANGAN SPBE

#### A. Analisis Kesenjangan (Gap analyst) Domain Proses Bisnis

Analisis kesenjangan ditunjukkan pada tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1 Analisa Kesenjangan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**





No	Arsitektur Target	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	Pengelolaan Intelijen	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
2.	Pengelolaan Penyelidikan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
3.	Pengelolaan Pengamanan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
4.	Pengelolaan Penggalangan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
5.	Pengawasan Multimedia	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
6.	Pengelolaan Tindak Pidana	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan <i>stakeholder</i> secara lengkap	
7.	Pengelolaan Pra Penuntutan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan <i>stakeholder</i> secara lengkap	
8.	Pengelolaan Penyidikan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan <i>stakeholder</i> secara lengkap	
9.	Pengelolaan Penuntutan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan <i>stakeholder</i> secara lengkap	
10.	Pengelolaan Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	Proses bisnis saat ini tergabung menjadi Teknologi informasi, persandian, dan produksi intelijen, terdapat redundansi dengan pengelolaan teknologi informasi pada pusat data statistic criminal dan teknologi informasi	Diperlukan pemisahan teknologi informasi menjadi satu pintu pengelolaan melalui proses bisnis <i>pengelolaan</i> data, statistic criminal, dan teknologi informasi	
11.	Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Proses bisnis saat ini belum terhubung dan belum adanya data dalam bentuk digital	Diperlukanya sistem yang dapat mengelola dan menjadi satu pintu dalam pengelolaan perkara dibidang pidana umum dan pidan akhusus	
12.	Penegakan Hukum	Proses bisnis penegakan hukum telah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal	Diperlukanya sistem yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara online	
13.	Bantuan Hukum	Proses bisnis bantuan hukum telah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal	Diperlukanya sistem yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara online	
14.	Pelayanan Hukum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
15.	Pertimbangan Hukum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
16.	Tindakan Hukum Lain	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
17.	Pertimbangan Hukum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan	-	

No	Arsitektur Target	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
		keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap		
18.	Tindakan Hukum Lain			
19.	Pengelolaan Pemulihan Aset	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
20.	Penelusuran Aset	Proses bisnis reformasi birokrasi telah tersedia untuk sampai dengan level penilai internal	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal	
21.	Pengamanan Aset	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
22.	Pemeliharaan Aset	Sub fungsi Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
23.	Perampasan Aset	Sub fungsi pemusnahan/penghapusan aset belum terintegrasi dengan maksimal didalam sistem	Perlu adanya peningkatan performance dari aplikasi untuk melakukan pengelolaan data serta perlu peningkatan <i>stakeholder</i> dalam pengisian data	
24.	Pengembalian Aset	Sub fungsi pengembalian aset belum secara maksimal dapat dirasakan oleh masarakat	Perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses bisnis pengembalian aset	
25.	Pemusnahan/ Penghapusan Aset	Sub fungsi pemusnahan/penghapusan aset belum terintegrasi dengan maksimal didalam sistem	Perlu adanya peningkatan performance dari aplikasi untuk melakukan pengelolaan data serta perlu peningkatan <i>stakeholder</i> dalam pengisian data	
26.	Pengelolaan Kebijakan dan Kerjasama	Sub fungsi pengelolaan kepegangatan dan angka kredit pegawai belum terintegrasi dengan instansi lain	Pelu ada nya peningkatan sub fungsi Kepegangatan Dan Angka Kredit Pegawai	
27.	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
28.	Pengelolaan Naskah Dinas Pengaturan lainnya	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
29.	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri	Telah tersedia proses bisnis pemberhentian pegawai	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal	
30.	Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
31.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
32.	Pengelolaan Data dan Informasi Kejaksan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
33.	Pengelolaan Infrastruktur TIK	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
34.	Pengelolaan Keamanan Informasi	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
35.	Pengelolaan, Analisis Data dan Statistik	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	

No	Arsitektur Target	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
36.	Perpustakaan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
37.	Pelayanan Informasi Publik	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
38.	Pengelolaan Media dan Kehumasan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
39.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan dengan kolaborasi antar <i>stakeholder terkait</i>	
40.	Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan dengan kolaborasi antar <i>stakeholder terkait</i>	
41.	Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan memenuhi proses bisnis pendidikan dan pelatihan berbasis IT & AI	
42.	Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Hanya terdapat analisis data dan statistik kriminal	Perlu peningkatan dan penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
43.	Pengelolaan SDM	Belum terdapat sub fungsi penyajian dan pemanfaatan data statistik kriminal	Perlu membuat sub fungsi penyajian dan pemanfaatan data statistic criminal	
44.	Perencanaan dan Pengadaan SDM	Belum terdapat sub fungsi standarisasi data	Perlu membuat sub fungsi standarisasi data	
45.	Pengembangan SDM	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat lunak	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
46.	Pengelolaan Diklat	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat lunak	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
47.	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat keras dan jaringan	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
48.	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat keras dan jaringan	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
49.	Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal	Belum terdapat sub fungsi audit teknologi informasi	Perlu membuat sub fungsi audit teknologi informasi	
50.	Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	Belum terdapat sub fungsi Perumusan, Penyusunan, Dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	Perlu membuat sub fungsi Perumusan, Penyusunan, Dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	
51.	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	Belum terdapat sub fungsi Pelayanan Kesehatan Yustisial	Perlu membuat sub fungsi Pelayanan Kesehatan Yustisial	
52.	Pelaksanaan Anggaran	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
53.	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
54.	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukanya sistem satu pintu yang dapat memonitoring berjalany SOP layanan dan anggaran	
55.	Pengadaan Barang dan Jasa	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukan peningkatan persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog menjadi 80%	
56.	Pengelolaan Barang Milik Negara	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukanya pengelolaan labeling dalam pengelempokan barang	
57.	Pengelolaan Organisasi	Terdapat beberapa proses bisnis yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian beberapa proses bisnis yang berganti, ditiadakan, ataupun perlu dibentuk.	
58.	Penataan Lembaga dan Ketatalaksanaan	Terdapat beberapa proses bisnis yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan	Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian beberapa proses bisnis	

No	Arsitektur Target	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
		peraturan perundang-undangan yang terbaru	yang berganti, ditiadakan, ataupun perlu dibentuk.	
59.	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Proses bisnis reformasi birokrasi telah tersedia untuk sampai dengan level penilai internal	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder eksternal</i>	
60.	Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	Proses bisnis sudah berjalan dengan baik namun belum terdapat kode referensi arsitektur proses bisnis yang sesuai pada referensi arsitektur proses bisnis nasional	Diperlukan penambahan kode referensi arsitektur proses bisnis ketatausahaan dan keprotokolan pada referensi arsitektur proses bisnis nasional	
61.	Pengelolaan Pengawasan	Manajemen Audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan perencanaan manajemen audit TIK pada peta rencana SPBE Kejaksaan RI	
62.	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	Manajemen Audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan perencanaan pelaksanaan audit TIK pada peta rencana SPBE	
63.	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tindak lanjut hasil audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan perencanaan tindak lanjut audit TIK pada peta rencana SPBE	
64.	Pengelolaan Kesehatan Yustisia	Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi proses bisnis pengelolaan kesehatan yustisia	
65.	Pengelolaan Kesehatan Umum	Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi subproses bisnis pengelolaan kesehatan umum	
66.	Pengelolaan Kesehatan Yustisia	Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi subproses bisnis pengelolaan kesehatan umum	

Keterangan:

-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan

## B. Analisis Kesenjangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE





Analisa Kesenjangan Arsitektur Data dan Informasi Kejaksaan Republik Indonesia ditunjukkan pada Tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7.2 Analisa Kesenjangan Arsitektur Data dan Informasi Kejaksaan Republik Indonesia**

No	Arsitektur Target	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	Interoperabilitas Data Perkara SPPT-TI	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
2.	Interoperabilitas Data Kepegawaian	Sudah dilakukan namun belum terencana dan terjadwal	Perlu penjadwalan berkala	
3.	Interoperabilitas Data Keuangan	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
4.	Interoperabilitas Data JDIH	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
5.	Interoperabilitas Data Perencanaan	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
6.	Interoperabilitas Data Penganggaran	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
7.	Interoperabilitas Data BMN	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
8.	Interoperabilitas Data Reformasi Birokrasi	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
9.	Integrasi Data Persuratan dengan Aplikasi eksisting	Sudah dilakukan namun belum terencana dan terjadwal	Perlu penjadwalan berkala	

Keterangan:

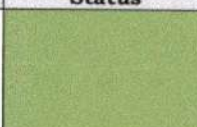
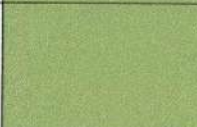

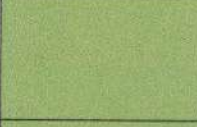
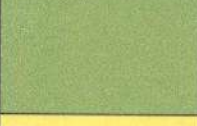
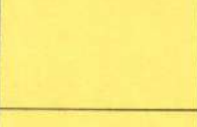
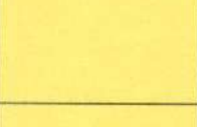
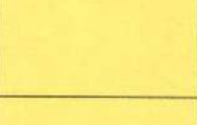
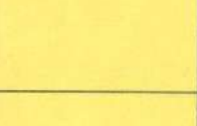

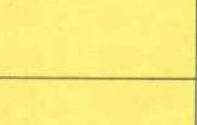



-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan

### C. Analisis Kesenjangan Layanan SPBE

Analisis Kesenjangan Arsitektur Target Layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dilihat pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4. Analisis Kesenjangan Arsitektur Layanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

No	Layanan	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	Pengelolaan Intelijen	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
2.	Penyelidikan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
3.	Pengamanan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
4.	Penggalangan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
5.	Pengawasan Multimedia	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
6.	Pengamanan Pembangunan Strategis	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan stakeholder secara lengkap	
7.	Layanan Persandian	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan stakeholder secara lengkap	
8.	Pengelolaan Tindak Pidana	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan stakeholder secara lengkap	
9.	Pra Penuntutan	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional	Diperlukan peningkatan keterlibatan stakeholder secara lengkap	
10.	Penyidikan	Proses bisnis saat ini tergabung menjadi Teknologi informasi, persandian, dan produksi intelijen, terdapat redundansi dengan pengelolaan teknologi informasi pada pusat data statistic criminal dan teknologi informasi	Diperlukan pemisahan teknologi informasi menjadi satu pintu pengelolaan melalui proses bisnis pengelolaan data, statistic criminal, dan teknologi informasi	
11.	Penuntutan	Proses bisnis saat ini belum terhubung dan belum adanya data dalam bentuk digital	Diperlukanya sistem yang dapat mengelola dan menjadi satu pintu dalam pengelolaan perkara dibidang pidana umum dan pidan akhusus	
12.	Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi	Proses bisnis penegakan hukum telah tersedia namun belum	Diperlukanya sistem yang dapat memberikan bantuan	

		dimanfaatkan secara optimal	hukum kepada masyarakat secara online	
13.	Penanganan Perkara Tilang	Proses bisnis bantuan hukum telah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal	Diperlukanya sistem yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara online	
14.	Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi(SPPT-TI)	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
15.	Layanan Pengembalian Barang Bukti	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
16.	Layanan Pemeliharaan Barang Bukti	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
17.	Layanan Pemusnahan Barang Bukti	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
18.	Pengelolaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal	
19.	Penegakan Hukum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
20.	Bantuan Hukum	Proses bisnis reformasi birokrasi telah tersedia untuk sampai dengan level penilai internal	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal	
21.	Pelayanan Hukum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
22.	Pertimbangan Hukum	Sub fungsi Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap	-	
23.	Tindakan Hukum Lain	Sub fungsi pemusnahan/penghapusan aset belum terintegrasi dengan maksimal didalam sistem	Perlu adanya peningkatan performance dari aplikasi untuk melakukan pengelolaan data serta perlu peningkatan stakeholder dalam pengisian data	
24.	Pemulihan Aset	Sub fungsi pengembalian aset belum secara maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat	Perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses bisnis pengembalian aset	
25.	Penelusuran Aset	Sub fungsi pemusnahan/penghapusan aset belum terintegrasi dengan maksimal didalam sistem	Perlu adanya peningkatan performance dari aplikasi untuk melakukan pengelolaan data serta perlu peningkatan stakeholder dalam pengisian data	
26.	Pengamanan Aset	Sub fungsi pengelolaan kepangkatan dan angka kredit pegawai belum	Perlu adanya peningkatan sub fungsi Kepangkatan	

		terintegrasi dengan instansi lain	Dan Angka Kredit Pegawai	
27.	Pemeliharaan Aset	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
28.	Perampasan Aset	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
29.	Pengembalian Aset	Telah tersedia proses bisnis pemberhentian pegawai	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder eksternal</i>	
30.	Pemusnahan/ Penghapusan Aset	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
31.	Pengelolaan SDM	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
32.	Perencanaan dan Pengadaan SDM	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
33.	Pengembangan SDM	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
34.	Pengelolaan Diklat	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
35.	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
36.	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
37.	Pengelolaan Perlindungan dan Bantuan Hukum Internal	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
38.	Pengelolaan Keuangan dan Sarpras	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
39.	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan dengan kolaborasi antar <i>stakeholder terkait</i>	
40.	Pelaksanaan Anggaran	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan dengan kolaborasi antar <i>stakeholder terkait</i>	
41.	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Negara	Sudah memenuhi proses bisnis ideal	Ditingkatkan memenuhi proses bisnis pendidikan dan pelatihan berbasis IT & AI	
42.	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	Hanya terdapat analisis data dan statistik criminal	Perlu peningkatan dan penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
43.	Pengadaan Barang dan Jasa	Belum terdapat sub fungsi penyajian dan pemanfaatan data statistik kriminal	Perlu membuat sub fungsi penyajian dan pemanfaatan data statistic criminal	

44.	Pengelolaan Barang Milik Negara	Belum terdapat sub fungsi standarisasi data	Perlu membuat sub fungsi standarisasi data	
45.	Pengelolaan Organisasi	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat lunak	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
46.	Penataan Lembaga dan Ketatalaksanaan	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat lunak	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
47.	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat keras dan jaringan	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
48.	Pengelolaan Ketatausahaan dan Keprotokolan	Hanya terdapat sub fungsi pengelolaan perangkat keras dan jaringan	Perlu penataan ulang dari sub fungsi yang sudah ada	
49.	Pengelolaan Pengawasan	Belum terdapat sub fungsi audit teknologi informasi	Perlu membuat sub fungsi audit teknologi informasi	
50.	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	Belum terdapat sub fungsi Perumusan, Penyusunan, Dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	Perlu membuat sub fungsi Perumusan, Penyusunan, Dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	
51.	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Belum terdapat sub fungsi Pelayanan Kesehatan Yustisial	Perlu membuat sub fungsi Pelayanan Kesehatan Yustisial	
52.	Pengelolaan Kesehatan Yustisial	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
53.	Pengelolaan Kesehatan Umum	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	-	
54.	Pengelolaan Kesehatan Yustisial	Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukanya sistem satu pintu yang dapat memonitoring berjalany SOP layanan dan anggaran	
		Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukan peningkatan persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog menjadi 80%	
		Proses bisnis telah mengacu kepada SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder</i> eksternal secara lengkap	Diperlukanya pengelolaan labeling dalam pengelempokan barang	
		Terdapat beberapa proses bisnis yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian beberapa proses bisnis yang berganti, ditiadakan, ataupun perlu dibentuk.	
		Terdapat beberapa proses bisnis yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian beberapa proses bisnis yang berganti, ditiadakan, ataupun perlu dibentuk.	
		Proses bisnis reformasi birokrasi telah tersedia untuk sampai dengan level penilai internal	Perlu integrasi dengan referensi SPBE Nasional dengan menunjukkan keterlibatan <i>stakeholder eksternal</i>	
		Proses bisnis sudah berjalan dengan baik namun belum terdapat kode referensi arsitektur proses bisnis yang sesuai pada referensi arsitektur proses bisnis nasional	Diperlukan penambahan kode referensi arsitektur proses bisnis ketatausahaan dan keprotokolan pada referensi arsitektur proses bisnis nasional	

		Manajemen Audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan perencanaan manajemen audit TIK pada peta rencana SPBE Kejaksaan RI	
		Manajemen Audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan pelaksanaan audit TIK pada peta rencana SPBE	
		Tindak lanjut hasil audit TIK belum terlaksana secara terencana	Diperlukan perencanaan tindak lanjut audit TIK pada peta rencana SPBE	
		Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi proses bisnis pengelolaan kesehatan yustisia	
		Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi subproses bisnis pengelolaan kesehatan umum	
		Proses bisnis belum diimplementasikan	Diperlukan implementasi subproses bisnis pengelolaan kesehatan umum	

Keterangan:

-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan

#### D. Analisis Kesenjangan Infrastruktur SPBE

Analisis Kesenjangan Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dilihat pada tabel 4.13 berikut.

**Tabel 4.13 Analisis Kesenjangan Arsitektur Infrastruktur SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

No.	Item Infrastruktur	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	Pusat Data Nasional Kominfo	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
2.	Data Center Kejaksaan LT 8 GD Daskrimti	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
3.	Data Center Kejaksaan LT SB GD Daskrimti	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
4.	Data Recovery Center Kejaksaan	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
5.	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
6.	Interoperabilitas dengan DJA	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
7.	Interoperabilitas DJP	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
8.	Interoperabilitas DJPB	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
9.	Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu pengembangan	
10.	VPN IGSN (Intra Government Secured Network) Kantor Staf Presiden	Sudah digunakan dan dikolaborasikan	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	

		dengan instansi terkait		
11.	VPN IGSN simponi Kemenkeu	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
12.	VPN Metro Kominfo	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
13.	Cloud Kejaksaan	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu migrasi ke Pusat Data Nasional/ Pusat Data Kejaksaan	
14.	Gitlab	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
15.	Zoom	Optimal	-	
16.	Web Host Manager	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
17.	SAN Storage	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala dan penambahan storage	
18.	NAS Storage	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala dan penambahan storage	
19.	Storage HDD	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala dan penambahan storage	
20.	SIMKARI 1	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
21.	SIMKARI 2	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
22.	SIMKARI 3	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
23.	SIMKARI 4	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
24.	SIMKARI 5	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
25.	SIMKARI 6	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
26.	SIMKARI 7	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
27.	DRC SIMKARI 1	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
28.	DRC SIMKARI 2	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
29.	MAIL	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
30.	Switch Fiberhome Kejagung	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
31.	Router Data Center Kejagung	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
32.	Router Gd Daskrimti	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
33.	Router Gd Pidum	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
34.	Router Gd Datun	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
35.	Router Gd Poliklinik	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
36.	Router Gd Puspenkum	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
37.	Router Gd Kartika	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
38.	Router Gd Pidsus	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
39.	Router Gd Utama Kejagung	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	
40.	Switch Fiberhome Kejagung	Sudah digunakan	Perlu reviu berkala	

Keterangan:

-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan

### E. Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi SPBE

Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dilihat pada tabel 4.13 berikut.

**Tabel 4.13 Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

No.	Item Aplikasi	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	JDIH	Sudah terkoneksi dengan JDIH Nasional	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
2.	E-Tilang	Sudah optimal	Perlu didaftarkan sebagai aplikasi umum	
3.	Halo JPN	Sudah optimal	-	
4.	LPSE-KEJAKSAAN	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
5.	SP4N-LAPOR!	Sudah digunakan dan dikolaborasikan	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	

No.	Item Aplikasi	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
		dengan instansi terkait		
6.	KRISNA	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
7.	SAKTI	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
8.	E-MONEV	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
9.	CMS PIDUM	Sudah tergabung dalam SPPT-TI	Perlu pendaftaran menjadi aplikasi umum	
10.	CMS PIDSUS	Sudah tergabung dalam SPPT-TI	Perlu pendaftaran menjadi aplikasi umum	
11.	CMS DATUN	Belum berfungsi dengan optimal	Perlu pengembangan	
12.	LMS	Sudah optimal	-	
13.	SIPEDE	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait dan pengguna sistem	
14.	SIMKARI KEPEGAWAIAN	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait dan pengguna sistem	
15.	MY SIMKARI	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait dan pengguna sistem	
16.	PTSP	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait dan pengguna sistem	
17.	BUKU TAMU	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
18.	SILABIN	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
19.	KEJAKSAAN MOBILE	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
20.	MAIL KEJAKSAAN	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
21.	ARSSYS	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
22.	SADAP	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
23.	SIACC	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
24.	INDERA SEMBILAN	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
25.	VICA	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
26.	Sicana	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	
27.	Web Kejaksaan RI	Sudah digunakan dan dikolaborasikan dengan instansi terkait	Perlu reviu berkala dengan instansi terkait	


Keterangan:

-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan



## F. Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan SPBE

Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia dilihat pada tabel 6.8 berikut.

**Tabel 6.8 Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan SPBE Kejaksaan Republik Indonesia**

No.	Item Keamanan	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan	Status
1.	Penerapan Manajemen SMKI	Baru berupa draft	Perlu penetapan dan Penerapan Kebijakan	
2.	Pelaksanaan Audit Keamanan	Belum dilaksanakan dan direncanakan secara terjadwal	Perlu pelaksanaan audit internal dan eksternal yang terencana	
3.	Kelaikan keamanan			
4.	Penanganan Insiden Siber	Sudah melibatkan instansi yang berwenang dalam penanganan insiden keamanan	Sudah melibatkan instansi yang berwenang dalam penanganan insiden keamanan	
5.	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Belum melaksanakan sosialisasi	Perlu melaksanakan sosialisasi	
6.	Identifikasi Kerentanan	Sudah dilaksanakan belum terjadwal	Perlu penjadwalan berkala	
7.	Peningkatan Keamanan Informasi	Sudah dilakukan namun belum terencana dan terjadwal	Perlu penjadwalan berkala	

Keterangan:

-  = Sudah memenuhi kondisi ideal
-  = Perlu Pengembangan
-  = Belum Tersedia
-  = Tidak Relevan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 188 TAHUN 2023  
TENTANG  
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2023-2024

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disusun sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan SPBE di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI. Dalam penyusunannya dilakukan pemetaan kondisi awal yang menggambarkan SPBE yang telah diimplementasikan serta menghimpun berbagai masukan serta harapan dari para stakeholder yang pada akhirnya mengarah pada kondisi ideal (menuju ideal) SPBE yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan di lingkungan Kejaksaan RI.

Berdasarkan Peta Rencana Kejaksaan RI diharapkan dapat membantu menyusun kebutuhan pengembangan dan prioritasnya dari perspektif kebutuhan di lapangan dan layanan yang diberikan. Inisiatif strategis yang dibangun disesuaikan dengan visi, misi, dan kebijakan Kejaksaan RI sehingga arah pengembangan tidak melenceng dari koridor yang telah ditetapkan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel. Dokumen ini akan senantiasa dikaji dan diselaraskan agar dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah ditetapkan untuk jangka waktu 2023 - 2024, Peta Rencana SPBE ini akan dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai atau pada akhir pelaksanaan dengan kebutuhan berdasarkan:

1. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. Perubahan Rencana Strategis Kejaksaan RR;
3. Perubahan Arsitektur SPBE Kejaksaan RI;
4. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kejaksaan RI (sesuai kebutuhan).

Cakupan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI adalah :

1. Tata kelola SPBE
2. Manajemen SPBE
3. Layanan SPBE
4. Aplikasi SPBE
5. Infrastruktur SPBE
6. Keamanan SPBE
7. Audit SPBE

Adapun tabel peta rencana dari data awal dan kebutuhan sesuai periode waktunya dapat dilihat pada tabel berikut:

KEGIATAN		PIC	2023	2024
<b>I. TATA KELOLA</b>				
<b>A</b>	<b>Kebijakan Manajemen Pengetahuan</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Pengetahuan SPBE Kejaksaan RI		1 Dokumen	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Berkala Kebijakan Internal Manajemen Pengetahuan SPBE Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
3.	Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Pengetahuan SPBE Kejaksaan RI			1 Laporan
<b>B</b>	<b>Peraturan Kejaksaan RI tentang Standar dan Tata Cara Audit Aplikasi dan Infrastruktur</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Audit Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi		1 Dokumen	-
2.	Evaluasi pedoman teknis tata cara audit aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi		-	1 Laporan
<b>C</b>	<b>Peraturan / Keputusan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI</b>	Biro Perencanaan, Biro Hukum		
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Jaksa Agung tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI		1 Dokumen	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan / Keputusan Jaksa Agung tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
3.	Reviu dan Tindak Lanjut Peraturan / Keputusan Jaksa Agung tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI		-	1 Laporan
<b>D</b>	<b>Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan RI</b>	Biro Perencanaan, Biro Hukum		
1.	Penyusunan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan RI		1 Dokumen	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
3.	Reviu dan Tindak Lanjut hasil reviu Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan RI		-	1 Laporan
<b>E</b>	<b>Keputusan Jaksa Agung tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI</b>	BIROCANA		
1.	Penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung		1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Sosialisasi Keputusan Jaksa Agung		1 Laporan	1 Laporan
3.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keputusan Jaksa Agung		1 Laporan	1 Laporan
4.	Reviu dan Tindak Lanjut Keputusan Jaksa Agung		-	1 Laporan
<b>F</b>	<b>Keputusan Jaksa Agung tentang Tim CSIRT</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		
1.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim CSIRT Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
2.	Reviu dan Tindak Lanjut Keputusan Jaksa Agung		-	1 Laporan

KEGIATAN		PIC	2023	2024
<b>G</b>	<b>Keputusan Koordinator SPBE tentang Tim Audit TIK Internal Kejaksaan RI</b>	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	Penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Audit TIK Internal Kejaksaan RI		1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Audit TIK Internal Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
3.	Reviu dan Tindak Lanjut Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Audit TIK Internal Kejaksaan RI		-	1 Laporan
<b>II. MANAJEMEN SPBE</b>				
<b>A</b>	<b>Manajemen Aset TIK</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Biro Perlengkapan		
1.	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK		1 Dokumen	
2.	Sosialisasi Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK		1 Laporan	-
3.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK		1 Laporan	1 Laporan
4.	Reviu tindak lanjut evaluasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK		-	1 Laporan
<b>B</b>	<b>Manajemen Layanan SPBE</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Biro Perencanaan		
1.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Pengelolaan Tindak Pidana Terpadu		1 Dokumen	-
2.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Kepegawaian Online		1 Dokumen	-
3.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Penanganan Perkara Tilang Terpadu Online		1 Dokumen	
4.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Jaksa Pengacara Negara Online		-	1 Dokumen
5.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		-	1 Dokumen
6.	Penyediaan Platform dan SOP Layanan Kesehatan Yustisial		-	1 Dokumen
<b>C</b>	<b>Manajemen Risiko SPBE</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP dan Manajemen Risiko SPBE		1 Dokumen	-
2.	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Risiko SPBE		1 Laporan	1 Laporan
3.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Risiko SPBE		-	1 Laporan

KEGIATAN		PIC	2023	2024
4.	Reviu Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Risiko SPBE			1 Laporan
<b>D Manajemen Perubahan SPBE</b>		Biro Perencanaan		
1.	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE		1 Dokumen	-
2.	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE		1 Laporan	1 Laporan
3.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE		-	1 Laporan
4.	Reviu Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE		-	1 Laporan
<b>E Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Biro Kepegawaian		
1.	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE		1 Dokumen	-
2.	Implementasi Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE		1 Laporan	
3.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE			1 Laporan
4.	Tindak lanjut reviu dokumen Penerapan Sumber Daya Manusia SPBE			1 Laporan
<b>F Manajemen Pengetahuan</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Biro Kepegawaian, Badan Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Penyusunan dokumen penerapan manajemen pengetahuan SPBE di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
2.	Sosialisasi dan implementasi penerapan manajemen pengetahuan SPBE di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI			1 Laporan
3.	Monitoring dan evaluasi Penerapan manajemen pengetahuan SPBE di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI			1 Laporan
<b>G Manajemen Keamanan Informasi</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		
1.	Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kejaksaan RI		1 Laporan	-
2.	Sosialisasi dan implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan

KEGIATAN		PIC	2023	2024
3.	Monitoring dan evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kejaksaan RI			1 Laporan
<b>H Manajemen Data</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
-	Monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen data		1 Laporan	1 Laporan
-	Tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan manajemen data			1 Laporan
-	Interoperabilitas Data dengan Data Instansi lain		1 Laporan	1 Laporan
<b>I Manajemen Pengetahuan</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Biro Perlengkapan		
1.	Sosialisasi Manajemen Pengetahuan SPBE		1 Laporan	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE		1 Laporan	1 Laporan
<b>III. LAYANAN SPBE</b>				
<b>A Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		
1.	Layanan Perencanaan	Biro Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Layanan Penganggaran	Biro Perencanaan		1 Laporan
3.	Layanan Keuangan	Biro Keuangan		1 Laporan
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Perlengkapan		1 Laporan
5.	Layanan Kepegawaian	Biro Kepegawaian		1 Laporan
6.	Layanan Kearsipan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri		1 Laporan
7.	Layanan Pengelolaan BMN	Biro Perlengkapan		1 Laporan
8.	Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		1 Laporan
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		1 Laporan
10.	Layanan Kinerja Pegawai			1 Laporan
<b>B Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>				
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Pusat Penerangan Hukum	1 Laporan	1 Laporan
2.	Layanan Data Terbuka			1 Laporan
3.	Layanan JDIH	Pusat Penerangan Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan
4.	Layanan Kesehatan Yustisial	Pusat Kesehatan Yustisia	-	1 Laporan
<b>C Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik</b>		Pengelola masing-masing layanan		

KEGIATAN		PIC	2023	2024
1.	Monitoring dan evaluasi layanan Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi(SPPT-TI)		2 Laporan	4 Laporan
2.	Tindak lanjut hasil evaluasi layanan SPPT-TI			1 Laporan
3.	Monitoring dan evaluasi layanan E-Tilang Kejaksaan RI		1 Laporan	1 Laporan
4.	Tindak lanjut hasil evaluasi layanan E-Tilang Kejaksaan RI			1 Laporan
5.	Monitoring dan evaluasi layanan Halo Jaksa Pengacara Negara(JPN)		1 Laporan	1 Laporan
6.	Tindak lanjut hasil evaluasi layanan Halo JPN			1 Laporan
<b>IV. APLIKASI SPBE</b>				
<b>A</b>	<b>Aplikasi Umum</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	Pengajuan Aplikasi Umum E-Tilang		1 Laporan	-
2.	Pengajuan Aplikasi Umum Case Management System		-	1 Laporan
3.	Aplikasi Administrasi Pemerintahan			
a.	Reviu berkala penggunaan aplikasi perencanaan Bappenas		1 Laporan	1 Laporan
b.	Reviu berkala penggunaan aplikasi penganggaran Kemenkeu		1 Laporan	1 Laporan
c.	Reviu berkala penggunaan aplikasi keuangan Kemenkeu		1 Laporan	1 Laporan
d.	Reviu berkala penggunaan aplikasi pengadaan barang dan jasa LKPP		1 Laporan	1 Laporan
e.	Reviu berkala penggunaan aplikasi kepegawaian		1 Laporan	1 Laporan
f.	Reviu berkala penggunaan aplikasi kearsipan		1 Laporan	1 Laporan
g.	Reviu berkala penggunaan aplikasi pengelolaan BMN Kemenkeu		1 Laporan	1 Laporan
h.	Reviu berkala penggunaan aplikasi pengawasan internal terkait pemerintah		1 Laporan	1 Laporan
i.	Reviu berkala penggunaan aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi		1 Laporan	1 Laporan
j.	Reviu berkala penggunaan aplikasi Kinerja Pegawai		1 Laporan	1 Laporan
4.	Aplikasi Publik			
a.	Reviu berkala penggunaan aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik		1 Laporan	1 Laporan
b.	Reviu berkala penggunaan aplikasi JDII		1 Laporan	1 Laporan
<b>B</b>	<b>Aplikasi Publik Sektoral / Aplikasi Khusus</b>	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
1.	<b>Aplikasi SIMKARI Kepegawaian</b>			
	Kegiatan:			
-	Integrasi data kepegawaian dengan beberapa aplikasi yang dibangun oleh Biro Perlengkapan		1 Laporan	1 Laporan
-	Pemeliharaan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
2.	<b>Aplikasi Dashboard Pimpinan</b>			
	Kegiatan:			
-	Pemutakhiran data pada aplikasi CMS Pidum, Pidsus, Datun, EPNBP dan Kepegawaian		1 Laporan	1 Laporan
-	Sinkronisasi realtime Aplikasi CMS Pidum, Pidsus, Datun, EPNBP dan Kepegawaian		1 Laporan	1 Laporan
-	Penambahan Data CMS Pidmil			1 Laporan
3.	<b>Aplikasi MySimkari</b>			

KEGIATAN		PIC	2023	2024
Kegiatan:				
-	Integrasi data kepegawaian dengan beberapa aplikasi yang dibangun oleh Biro Perlengkapan serta Badan Kepegawaian Negara		1 Laporan	
<b>4. Aplikasi E-Tilang</b>				
Kegiatan:				
-	Pemindahan Server ke Pusat Data Nasional		1 Laporan	
-	Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
-	Audit Aplikasi E-Tilang		1 Laporan	1 Laporan
<b>5. Aplikasi CMS Pidum</b>				1 Laporan
Kegiatan:				
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
<b>6. Aplikasi CMS Pidsus</b>				
Kegiatan:				
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
-	Update Bispro LP		1 Laporan	
<b>7. Aplikasi CMS Datun</b>				1 Laporan
Kegiatan:				
-	Implementasi penggunaan Aplikasi CMS Datun pada seluruh Satker se Indonesia		1 Laporan	
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
-	Bimtek CMS Datun Nasional		1 Laporan	1 Laporan
<b>8. Aplikasi CMS PIDMIL</b>				
Kegiatan:				
-	Penyusunan Proses Bisnis CMS PIDMIL		1 Laporan	
-	Pembangunan Aplikasi CMS PIDMIL			1 Laporan
<b>9. Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)</b>				
Kegiatan:				
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
-	Pemutakhiran data		1 Laporan	1 Laporan
<b>10. Aplikasi SIULAT (Sistem Informasi Unit Layanan Kesehatan Kejaksaan RI)</b>				
Kegiatan:				
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
<b>11. Aplikasi LMS</b>				
Kegiatan:				
-	Evaluasi, Perawatan dan pengembangan		1 Laporan	1 Laporan
-	Penambahan video tutorial CMS Datun dan Pidmil			1 Laporan
<b>12. Sistem Persuratan Dinas Elektronik</b>				
Kegiatan:				

KEGIATAN		PIC	2023	2024
-	Studi banding tingkat keamanan SPBE antar Kementerian dan Lembaga			1 Laporan
-	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE terkait kesadaran keamanan SPBE		1 Laporan	1 Laporan
<b>D Identifikasi Kerentanan</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
-	Vulnerability Assessment (VA)		1 obyek	1 obyek
-	Penetration Test		1 obyek	1 obyek
-	Uji Phishing		1 Laporan	1 Laporan
<b>E Peningkatan Keamanan Informasi</b>		Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		
-	Hardening, Bug Fixing, Patching, Updating dll		1 Laporan	1 Laporan
-	Automasi notifikasi tingkat kerumitan password autentikasi			1 Laporan
-	Pengamanan pertukaran data dan informasi			1 Laporan
<b>VII. AUDIT TIK</b>				
<b>A Persiapan Audit</b>				
-	Pelatihan Audit Internal SPBE Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan
<b>B Audit Aplikasi</b>				
-	Audit Internal Aplikasi Umum Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	-	1 Laporan
-	Audit Internal Aplikasi Khusus Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan
-	Audit Eksternal Aplikasi Khusus Kejaksaan RI	BRIN	-	1 Laporan
-	Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Aplikasi SPBE Kejaksaan RI	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	-	1 Laporan
<b>C Audit Infrastruktur</b>				
-	Audit Internal untuk Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	1 Laporan	1 Laporan
-	Audit Eksternal untuk Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI	BSSN / BRIN	-	1 Laporan
-	Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	-	1 Laporan
<b>D Audit Keamanan</b>				
-	Audit Internal Keamanan SPBE Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan
-	Audit Eksternal Keamanan SPBE Kejaksaan RI	BSSN	-	1 Laporan
-	Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Infrastruktur SPBE Kejaksaan RI	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	-	1 Laporan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN